

**PERLUASAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PEMBUKTIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ILLA MIFTAHUL JANNAH

145010101111068



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**PERLUASAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PEMBUKTIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737
K/Pid/2014)**

Oleh :

ILLA MIFTAHUL JANNAH

145010101111068

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 6 Agustus 2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

M.Hum. NIP.195707171984031002

NIP.195904061986012001

Eny Harjati, S.H.,

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.SiDr. Yulianti, S.H., LL.M. NIP.

196208051988021001

NIP.196607101992032003

SURAT PERNYATAAN
ORIGINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Illa Miftahul Jannah

NIM : 145010101111068

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya maupun data orang lain yang telah dipublikasikan dan yang telah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi penulis dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan saya sanggup gelar kesarjanaan saya dibatalkan, serta menerima sanksi yang telah ditentukan dalam peraturan Universitas brawijaya.

Malang, 15 Agustus 2018
Mahasiswa,

Illa Miftahul
Jannah145010101111068

**PERLUASAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU*
DALAM PEMBUKTIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737
K/Pid/2014)**

**Illa Miftahul Jannah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, Eny Harjati, S.H.,
M.Hum**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Illamjannah@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi telah menciptakan norma baru yaitu mengakui keberadaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 pada tahun 2010 Mengenai perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP menjadi “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri*”. Pada prinsipnya dalam Hukum Acara Pidana, *testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti karena tidak menjamin kebenarannya. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 *testimonium de auditu* diakui keberadaannya yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam Hukum Acara Pidana dan alat bukti persangkaan dalam Hukum Acara Perdata. Mengenai kasasi yang diajukan terdakwa, alasan-alasan kasasinya tidak dapat dibenarkan menurut Undang-undang karena alasan kasasinya tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: *Testimonium de auditu*, Pembuktian, Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Extended Definition of Testimony of *Testimonium De Auditu* in a Proof after
Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010**

(A study on Decision of Supreme Court Number 737 K/Pid/2014)

**Illa Miftahul Jannah, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Eny Harjati, S.H.,
M.Hum**

Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Email: Illamjannah@gmail.com

Abstract

Constitutional Court has created a new norm admitting the existence of *testimonium de auditu* as a proof regarding the Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 in 2010 on Proposal for Judicial Review of Act Number 8 of 1981 on Criminal Code Procedure in regard to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that has extended the definition of witness and testimony of the witness in Article 1 Number 26 and 27 of Criminal Code Procedure to '*any person that can give testimony in enquiry, prosecution, and judicature related with any criminal act that is not always heard, seen, and experienced by him/her*'. Principally, in Criminal Code Procedure, *testimonium de auditu* is not regarded as a proof, as it does not guarantee the truth. However, after the Decision of Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010, *testimonium de auditu* becomes accepted as a proof in Criminal Code Procedure and in Civil Code Procedure. In terms of cassation appealed by the defendant, the reasons coming with the cassation are not accepted by the Act, for they are irrelevant to what is stated in Article 253 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure and, therefore, the defendant is pleaded guilty.

Keywords: *Testimonium de auditu*, proof, Decision of Constitutional Court.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium de auditu* dalam Pembuktian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan dari berbagai pihak, dan motivasi kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Dr. Yuliati SH., L.LM selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Dr. Bambang Sugiri, SH., M.S selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan membantu penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Eny Harjati, S.H, M.Hum selaku pembimbing pendamping yang selalu sabar dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S, Ardi Ferdian S.H., M.Kn, dan Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H, Selaku Majelis penguji komprehensif.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama masa perkuliahan;

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta Muhammad Hari dan Umi Kulsum terima kasih atas kasih sayang, dukungan, kerja keras, serta doa yang tiada henti terucap untuk keberhasilan penulis;
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan memperoleh gelar kesarjanaan;
9. Keluarga besar FKPH (Forum Kajian dan Penelitian Hukum) yang telah berbagi ilmu dan pengalaman;
10. Teman-teman KKN Kelompok 5 yang telah memberikan dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan motivasi demi keberhasilan pendidikan;
12. Segenap pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan berkah dan balasan dari Allah SWT. Serta, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	Error! Bookmark not defined.
SUMMARY.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Testimonium de auditu</i>	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi.....	Error! Bookmark not defined.
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Sumber Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.

E. Analisis Bahan Hukum **Error! Bookmark not defined.**

F. Definisi Konseptual **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PEMBAHASAN.....Error! Bookmark not defined.

A. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Kedudukan Keterangan Saksi yang Bersifat *Testimonium de auditu* dalam Pembuktian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 ...**Error! Bookmark not defined.**

C. Dasar alasan permohonan kasasi terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014 terkait alasan permohonannya yang menganggap *judex facti* salah dalam mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu*.....**Error! Bookmark not defined.**

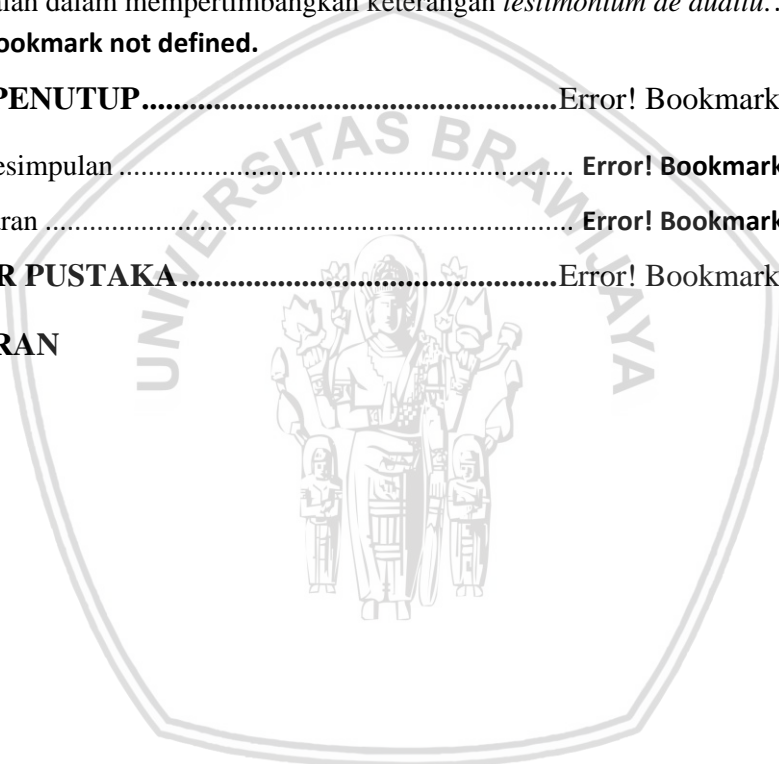
BAB V PENUTUPError! Bookmark not defined.

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.Perbandingan Putusan-Putusan	10
Tabel 2.Tabel Originalitas	11
Tabel 3.Nilai Kekuatan Alat-Alat Bukti	24
Tabel 4. Pro Dan Kontra Terkait <i>Testimonium de auditu</i>	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana mempunyai keterkaitan dengan hukum pidana, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran materiil suatu perkara pidana.¹ Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Karena, melalui pembuktian tersebutlah dapat terungkap adanya suatu tindak pidana sehingga dapat mengetahui salah atau benar bahwa seorang terdakwa melakukan tindak pidana. Pembuktian dalam sidang pengadilan mempunyai peran penting yaitu untuk menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang suatu kejadian sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin.²

Pembuktian merupakan memperlihatkan alat-alat bukti dipersidangan untuk menunjukkan kebenaran fakta, melakukan sesuatu untuk mengungkapkan kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan hakim. Kitab Undang-undang Hukum Acara tidak menjelaskan mengenai definisi pembuktian. Perlu diketahui, tujuan dari pembuktian itu sendiri untuk memutus suatu perkara pidana, bukan semata-mata hanyalah untuk menjatuhkan pidana saja. Sebab, untuk menjatuhkan pidana terdapat suatu syarat-syarat terbuhtinya

¹ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7.

² Putra Akbar Saleh, **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan**, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, Hlm. 80.

suatu kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Setelah proses pembuktian dijalankan dan terdapat lebih dari dua alat bukti sah maka majelis hakim akan mendapatkan keyakinan terkait bukti terjadinya tindak pidana, bahwa terdakwa melakukannya dan apabila mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa dapat dijatuhi pidana. Sebaliknya, jika menurut keyakinan hakim tindak pidana tidak terbukti, maka hakim memberi putusan bebas. Apabila tindak pidana terbukti dilakukan terdakwa, namun dalam persidangan terbukti adanya alasan yang meniadakan pidana baik dalam maupun luar Undang-undang, maka tidak di bebaskan dan juga tidak dipidana melainkan dijatuhkan amar putusan pelepasan dari tuntutan hukum.³ Dengan demikian, maka tidaklah dibenarkan apabila hakim dalam pengambilan keputusan, justru mengabaikan proses pembuktian.

Dalam pembuktian Hukum Acara Pidana, terdapat lima alat bukti yang sah untuk proses pembuktian acara pidana yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdiri dari alat bukti Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Berdasarkan lima macam alat bukti yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi sebagai alat bukti ada dalam urutan pertama. Jadi, keterangan saksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Dengan alat bukti keterangan saksi suatu fakta peristiwa pidana akan lebih terungkap. Namun tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai yang sah sebagai alat bukti, agar suatu keterangan saksi

³ Adami Chazawi, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 31.

mempunyai nilai pembuktian yang sah maka haruslah memenuhi syarat materiil dan juga harus memenuhi syarat formil.

Keterangan saksi yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian ialah apa yang telah tertuang dalam ketentuan KUHAP sebagaimana berikut yang menyatakan:

Pasal 1 Angka 26 KUHAP:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 Angka 27 KUHAP:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Definisi saksi dan keterangan saksi yang demikian itu terdapat suatu pembatasan mengenai definisi saksi dan keterangan saksi itu sendiri, dimana saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Dalam hal kasus tindak pidana kesusilaan terkait pembuktian, peran saksi alibi ataupun bukan saksi fakta dengan kata lain *testimonium de auditu* sangat berguna dalam membantu pembuktian bahwa telah benar-benar terjadi suatu peristiwa pidana. Berkaitan dengan hal ini, *testimonium de auditu* merupakan keterangan atau kesaksian yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Namun, hanya didapatkan karena mendengar dari orang lain atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya.⁴ Prinsipnya, dalam proses pembuktian di sidang pengadilan keterangan *testimonium de auditu* tidak

⁴ Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan**. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm. 661.

dipergunakan sebagai alat bukti karena sebagaimana tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran materiil dan untuk perlindungan terhadap hak setiap orang yang berperkara. Serta, keterangan yang tidak diperoleh berdasarkan yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP tidak menjamin kebenarannya, maka *testimonium de auditu* tidak dipergunakan sebagai alat bukti di Indonesia.⁵

Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan mengenai saksi berubah dimana hal ini telah ditegaskan dalam putusan Nomor 65/PUUVIII/2010 mengenai pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. Pasal 65 jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Jika kita mencermati dengan baik rumusan dari amar putusan tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi dengan jelas memperluas makna saksi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Perluasan makna tersebut berarti telah diakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan keberadaan saksi alibi sangat penting meskipun ia tidak mendengar, melihat, maupun tidak mengalami sendiri peristiwa pidana. serta, peran penting saksi bukan hanya berdasarkan pada yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri peristiwa. Akan tetapi, pentingnya saksi berdasarkan kesaksiannya yang memiliki relevansi dengan peristiwa pidana.⁶ Dengan itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menyatakan :

⁵ Andi Hamzah *Op.cit*, Hlm. 265

⁶ Steven Supranto, **Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “*Testimonium de auditu*” Dalam Peradilan Pidana**, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 – 52, Hlm. 35.

1. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan

dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Putusan tersebut termasuk jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran pada Undang-undang sesuai dengan *original intent* Undang-undang Dasar 1945. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi hanya memberikan penjelasan nilai keterangan saksi bukan hanya berdasarkan yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri terjadinya peristiwa pidana saja.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, terdapat satu putusan yang menarik untuk diteliti yaitu Putusan Nomor 737 K/Pid/2014. Putusan tersebut bermula dari tindak pidana pencabulan secara berlanjut yang dilakukan seorang terdakwa yang bernama H. Imam terhadap Korban bernama Husnul Hotimah, dimana terdakwa telah dianggap seperti orang tua sendiri oleh korban. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan sekitar tahun 2012. Dalam kasus ini, sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2013 telah diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang yaitu dengan Putusan Nomor 55/Pid.B/2013/PN.Spg. Kemudian, Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang dengan putusan Nomor 636/PID/2013/PT.Sby yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2014. Namun terdapat pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga pihak tersebut melakukan upaya kasasi pada tanggal 14 Maret 2014 pada Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 737 K/Pid/2014. Terdakwa ataupun

⁷ Asprianti Wangeke, **Kedudukan Saksi *De Audit* Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana**, Lex Crimen.Vol. VI/No. 6/Ags/2017. Hlm. 150

pemohon kasasi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan yang intinya terkait *testimonium de auditu* yang menimbang bahwa *Judex facti* salah telah membuat putusan berdasarkan atas pertimbangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi yang hanya diajukan oleh husnul hotimah selaku Pelapor dalam perkara *a quo* yang ternyata berdasarkan fakta persidangan kesemuanya saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mengalami serta tidak pernah menyaksikan peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa/pemohon kasasi, bahwa saksi Moh. Fadurrahman, saksi fadilah maupun saksi satumi kesemuanya merupakan saksi-saksi "*testimonium de auditu*"; alias bukan merupakan saksi fakta. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 185 ayat (5) yang dengan tegas menyebutkan; "baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi"; serta menganggap pertimbangan *Judex facti* yang mendasarkan pertimbangannya dari keterangan saksi "*Testimonium de auditu*", telah nyata-nyata menyimpang dari ketentuan Pasal 1 butir 27 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Dalam putusan ini, hakim menolak permohonan kasasi tersebut dengan memperbaiki putusan Nomor 636/PID/2013/PT.Sby yang menguatkan Putusan Nomor 55/Pid.B/2013/PN.Spg mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan. Serta dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Mengacu pada putusan Nomor 737 K/Pid/2014 ini penulis mempermasalahkan alasan kasasi pemohon, seperti yang telah diuraikan diatas mengenai alasan-alasan permohonan kasasi terdapat 3 saksi yang diajukan oleh Husnul Hotimah selaku pelapor yaitu terdiri dari saksi Moh. Fadurrahman, saksi Fadilah, saksi Sutami. Berdasarkan putusan ini, 3 (Tiga) saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri ataupun menyaksikan peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa. Bahwa saksi-saksi tersebut hanyalah bersifat *testimonium de auditu* ataupun bukan merupakan saksi fakta. Dalam putusan ini, saksi yang berdasarkan fakta hanyalah saksi korban yang sebagai pelapor yaitu husnul hotimah yang secara pribadi yang berdiri sendiri yang seharusnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa salah. Sehingga hal ini membuat terdakwa mengajukan permohonan kasasi karena menganggap bahwa hakim tidak benar dalam mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu* dan dalam alasan pengajuan kasasi tersebut *judex facti* dianggap mengenyampingkan pasal 1 angka 27 KUHAP.

Padahal jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010, telah dijelaskan bahwa keterangan saksi tidak semata hanya sekedar melihat, mendengar, atau merasakan melainkan selama saksi tersebut memiliki relevansi terhadap kasus tersebut. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, konteks pembuktian bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka/terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan perbuatan pidana benar-benar terjadi.⁸ Putusan Mahkamah

⁸ Hukum Online, **Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana>, Diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 termasuk putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif*. Sehingga sejak adanya putusan tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP sepanjang pengertian dari saksi dan keterangan saksi haruslah orang yang melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku.⁹

Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia, keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan alat bukti saksi. Namun, bila dilihat dari perkara diatas dapat dilihat bahwa dalam praktiknya terdapat pihak yaitu terdakwa yang belum menerima keberadaan keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dan belum dapat mengikuti putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam putusan *judex facti* telah benar ataupun telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menganggap keberadaan keterangan *testimonium de auditu* yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk mendapatkan bukti yang sesuai fakta sesungguhnya.

Dalam hal ini, penulis mendapatkan suatu putusan dimana dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/PN.SDN mengenai perkara perceraian. Dalam putusan tersebut tidak mengenyampingkan keterangan *testimonium de auditu*. Dengan kata lain, keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* digunakan sebagai alat bukti. Disini penulis akan membandingkan dengan Putusan Nomor 737 K/Pid/2014, yaitu sebagai berikut:

⁹ Asprianti Wangke, **Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana**, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, Hlm. 149.

Tabel 1
Perbandingan Putusan-Putusan

Judul Putusan	Hal-hal yang terdapat dalam Putusan	Perbedaannya
Putusan Nomor 737 K/Pid/2014	Dalam Putusan Kasasi ini terdapat alasan-alasan terdakwa/pemohon kasasi yang menganggap keterangan <i>testimonium de auditu</i> tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, dan menganggap pertimbangan hukum <i>judex facti</i> keliru karena telah mempertimbangkan keterangan <i>testimonium de auditu</i> yang diajukan oleh husnul hotimah, serta menganggap <i>judex facti</i> telah menyampingkan pasal 1 angka 27 KUHP.	Jika memperhatikan alasan-alasan pengajuan kasasi dalam putusan ini, hal tersebut tidak dapat dibenarkan menganggap <i>judex facti</i> seperti yang telah dijelaskan padahal <i>judex facti</i> telah benar dan telah menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini terdapat kesalahan dalam alasan-alasan pengajuan kasasi oleh pemohon.
Putusan Nomor 69/Pid.B/2014/P.N.SDN	Inti dari pertimbangan hukumnya saya menarik kesimpulan bahwa dari putusan ini kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dianggap sebagai satu saksi ataupun tetap dapat diterima sebagai saksi. Menurut Hakim pandangan keterangan saksi yang bersifat <i>testimonium de auditu</i> kurang tepat apabila sepenuhnya ditolak, melainkan keterangan demikian haruslah dilihat secara kasus per kasus dan tidak harus bersikap secara kaku.	Jadi, dalam Putusan ini dasar pertimbangan hakim terkait keterangan <i>testimonium de auditu</i> dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan untuk membuktikan suatu fakta.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis akan membahas terkait pihak yang tidak menerima putusan *judex facti* karena telah menggunakan keterangan saksi *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti sehingga pihak tersebut mengajukan permohonan kasasi, sehingga penulis mengangkat permasalahan ini dalam penulisan hukum dengan judul **“Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium de auditu* Dalam Pembuktian**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014)”.

Dalam Penelitian ini penulis mengemukakan penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian ini, agar mengetahui perbedaan yang jelas dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas. Penulis menguraikan penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel, sebagaimana berikut:

Tabel 2
Tabel Originalitas

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Ahmad Daenury/ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2014	Kesaksian <i>De Auditu</i> Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam ¹⁰	1. Bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dalam pandangan hukum acara pidana di Indonesia dan hukum acara pidana islam? 2. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang saksi <i>de auditu</i> dalam putusan Peninjauan Kembali No. 193 PK/Pid.Sus/2017?	Dalam penelitian yang telah dilakukakn ini, peneliti memfokuskan pada bagaimana kekuatan pembuktian kesaksian <i>de auditu</i> dalam acara pidana yang membandingkan dengan hukum islam dengan menganalisis salah satu putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kesaksian <i>de auditu</i> .

¹⁰ Ahmad Daenury, **Kesaksian De Auditu Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Dan Hukum Acara Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 193 PK/Pid.Sus/2010)**, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24884/1/Ahmad%20Daenury.FSH.pdf>, 2014.

2.	Sandi Handika/ Fakultas Hukum Universitas Lampung/ 2016	Analisis kekuatan pembuktian saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak (Studi Putusan PN No.69/Pid.B/2014/PN.SDN) ¹¹	1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada perkara No 69 /Pid.B/2014/ PN. Sdn ? 2. Apa dasar pertimbangan Hakim mengenyampingkan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> sebagai alat bukti yang dapat dipakai dalam mempertimbangkan putusan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada perkara No 69 /Pid.B/2014/ PN. Sdn ?	Dalam penelitian ini dibatasi pada Penelitian putusan terkait dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> dan dasar pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan penggunaan saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
----	---	--	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka terdapat suatu permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dalam pembuktian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010?
2. Apa dasar alasan permohonan kasasi terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.737 K/Pid/2014 Terkait alasan permohonannya yang menganggap *judex facti* salah dalam mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu*?

¹¹ Sandi Handika, **Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium de auditu* Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi putusan PN No.69/Pid.B/2014/Pn.Sdn)**, <http://digilib.unila.ac.id/21656/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, 2016.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dalam pembuktian pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar alasan permohonan kasasi terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.737 K/Pid/2014 Terkait alasan permohonannya yang menganggap *judex facti* salah dalam mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat memberikan perkembangan pada hukum acara pidana, khususnya mengenai saksi yang bersifat *testimonium de auditu* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang ingin melakukan penelitian seperti penulisan hukum yang telah ditulis oleh peneliti yang berguna untuk menambah ilmu dan wawasan bagi para pihak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak civitas akademika terutama bagi dosen dan mahasiswa hukum sebagai

bahan untuk melakukan penelitian terkait *testimonium de auditu* sebagai pembuktian pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama bagi hakim agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam menetapkan kesaksian *testimonium de auditu* dalam pembuktian.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bermanfaat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi pihak-pihak yang bersangkutan di pengadilan untuk memahami terkait keterangan *testimonium de auditu* dalam pembuktian.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis berdasarkan sistematika penulisan hukum. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keterkaitan dengan judul serta menghubungkan antara Bab satu dengan Bab lainnya. Berikut ini uraian singkat bahasan yang terdapat dalam setiap babnya :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulisan hukum/Skripsi dalam BAB I ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, terdiri dari materi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang berguna membantu penulis untuk memperjelas dalam menguraikan hasil penulisan. Dalam bab ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian, Tinjauan Umum tentang saksi, Tinjauan Umum Tentang *Testimonium de auditu*, Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi, dan Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan terkait Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum, Teknis Analisis Bahan Hukum, dan Definisi Konseptual.

BAB VI : PEMBAHASAN

Bab VI ini menjelaskan dan menguraikan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai perluasan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam pembuktian pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang ada terkait keterangan *testimonium de auditu* setelah adanya putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pembuktian

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup tua umurnya. Hal ini Karena manusia dan masyarakat, seprimitif apapun pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, di mana rasa keadilan tersebut akan tersentuh jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu perkara. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru seperti itu, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian.¹

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian. Pertama, kegiatan dalam pengadilan dalam mendapatkan suatu fakta-fakta dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan dimana yang berdasarkan Undang-undang yaitu membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang terdapat di persidangan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan alat bukti mengenai benar atau tidak telah terjadi tindak pidana.²

¹ Prisco Jeheskiel Umboh, **Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana**, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, Hlm. 112.

² Adami Chazawi, **Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana (Edisi Revisi)**, Media Nusa Creative, Malang, Cetakan Ketujuh, 2015. Hlm. 201

Dalam arti sempit, pembuktian adalah pengertian yang sama dengan pengertian dalam arti luas yang kedua. Dimana pengertian pembuktian juga dapat dilihat dari sisi tiga pihak, yaitu:³

a) Pihak Jaksa Penuntut Umum

Pembuktian merupakan kegiatan pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan alat bukti dan dengan cara tertentu yang menurut Undang-undang diarahkan pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan ditujukan untuk menambah keyakinan hakim bahwa telah terbukti terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.

b) Pihak Penasihat Hukum

Dari sudut penasihat hukum, pembuktian merupakan kegiatan membuktikan dengan menggunakan alat bukti dengan cara-cara tertentu yang menurut Undang-undang ditujukan pada suatu terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, ataupun ditujukan pada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, serta hal-hal yang meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa.

c) Pembuktian dari Sudut Majelis Hakim

Dari sudut dan fungsinya, dalam hal pembuktian hakim juga menggunakan alat bukti menurut cara-cara tertentu dalam Undang-undang untuk menganalisis terhadap fakta-fakta suatu peristiwa melalui pertimbangan-pertimbangan hukum dalam usaha menarik keyakinannya tentang terbukti

³ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm. 202

atau tidaknya dan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak melakukan tindak pidana. Kegiatan pembuktian yang dilakukan majelis hakim ini diwujudkan dalam vonis yang dibacakan dimuka persidangan.

Dalam pembuktian, terdapat beberapa macam alat bukti untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi suatu peristiwa pidana yang terdiri dari lima macam alat bukti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, diantaranya:

1) Keterangan Saksi

Merupakan Keterangan yang diperoleh berdasarkan apa yang ia ketahui, ia dengar, ia alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana.⁴ suatu keterangan saksi harus memenuhi syarat sah yang antara lain melakukan sumpah sebelum memberikan kesaksian; Keterangan saksi harus relevan dengan peristiwa; Keterangan harus diberikan di persidangan; Minimal terdapat 2 (dua) alat bukti keterangan saksi; dan pemeriksaan berdasarkan Undang-undang.

2) Keterangan Ahli

Suatu alat bukti dari seseorang yang karena keahliannya memberikan keterangan dimuka persidangan yang berdasarkan dari ilmu pengetahuannya.⁵ Keterangan ahli mempunyai perbedaan dengan keterangan saksi, karena keterangan ahli diperoleh dari pengetahuannya

⁴ Pasal 1 Angka 27 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Pasal 186 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penjelasan pasal “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan”.

berdasarkan ilmu pengetahuannya. Sedangkan, Keterangan saksi diperoleh berdasarkan yang ia ketahui, dengar sendiri, dan alami sendiri suatu peristiwa pidana.⁶ Syarat sah keterangan ahli antara lain, keterangan yang diberikan seorang ahli; memiliki keahlian khusus; menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya; dan diberikan dibawah sumpah.

3) Alat Bukti Surat

Surat adalah suatu alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta berdasakan Undang-undang yang memuat tentang suatu kejadian, yang mengandung tanda baca yang dimengerti dan bertujuan untuk memberikan atau mengeluarkan isi pikiran.⁷ Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 187 KUHAP. Syarat sah alat bukti surat harus dibuat atas sumpah jabatan, dibuat seseorang karena keahliannya, dan surat sebagaimana dalam Undang-undang.

4) Petunjuk

Pengertian alat bukti ini terdapat dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang menyatakan:

“petunjuk adalah perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang ada persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya.”

Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli.

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang berbentuk pengakuan ataupun penyangkalan dari terdakwa, hal ini juga diatur dalam ketentuan

⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 274.

⁷ Andi Hamzah, *ibid*, hlm. 275.

pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan. Apabila keterangan terdakwa diberikan diluar pengadilan, maka keterangan tersebut hanya digunakan untuk mendapatkan bukti dalam persidangan saja.⁸

Tujuan Pembuktian itu sendiri yaitu untuk menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Maka dapat disimpulkan, tujuan pembuktian ialah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan semata-mata bukanlah mencari kesalahan seseorang.⁹

Dalam Pembuktian acara pidana, terdapat suatu parameter atau tolak ukur pembuktian antara lain: *Bewijstheorie* yaitu teori pembuktian yang digunakan oleh hakim sebagai dasar pembuktian; *Bewijsmiddelen* yaitu alat bukti bukti yang digunakan sebagai membuktikan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum; *Bewijsvoering* yaitu cara menguraikan dan menyampaikan bukti di pengadilan; *Bewijslast* yaitu pembagian beban pembuktian berdasarkan Undang-undang untuk membuktikan di pengadilan; *Bewijskracht* yaitu nilai kekuatan pembuktian suatu alat bukti; dan, *Bewijs Minimum* yaitu bukti minimum yang digunakan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim.¹⁰

⁸ Darwin Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 148.

⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 231-232.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, **Teori & Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 15-26.

2. Teori atau Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan suatu kesatuan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh. Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori atau sistem pembuktian yang sebagai pedoman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan. Berikut beberapa macam teori Pembuktian :

1) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa ataupun mengabaikan alat bukti hanya dengan menggunakan keyakinannya yang diperoleh dari kesimpulan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.¹¹

2) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction in Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, dimana keyakinannya didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.¹² Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim tersebut haruslah

¹¹ Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2014, hlm 171.

¹² *Law students need, Sistem Dan Teori Pembuktian*, <http://lawstudentsneed.blogspot.co.id/2015/01/makalah-hukum-acara-pidana.html>, Di akses pada tanggal 17 Februari 2018.

berdasarkan alasan yang logis. Hakim wajib menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.¹³

3) Teori Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut Undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam Undang-undang tanpa campur tangan keyakinan hakim. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti tersebut pada Undang-undang.¹⁴

4) Teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Pada prinsipnya, teori hukum pembuktian menurut Undang-undang negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Hukum acara pidana Indonesia lebih mengacu pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) sebagaimana selaras dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

¹³ Tolib Effendi, *loc.cit.* Hlm. 171.

¹⁴ Tolib Effendi, *ibid.* Hlm. 171.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang benar salah melakukannya”.

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas kiranya bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif.¹⁵

3. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijskracht* yang merupakan masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut hanya dimiliki oleh kewenangan hakim, hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara beberapa alat bukti. Kekuatan pembuktian terletak pada bukti yang diajukan berdasarkan relevan atau tidaknya alat bukti dengan perkara yang disidangkan. Jika alat bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian terletak pada keyakinan hakim untuk menentukan dapat diterima atau tidak alat bukti tersebut. Kekuatan pembuktian terdapat dalam Pasal 183 KUHAP.¹⁶ Dikatakan sebagai kekuatan pembuktian karena dengan alat bukti tersebut hakim memutus suatu perkara, serta hakim dilarang menjatuhkan hukuman tanpa berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut.¹⁷

¹⁵ Tolib Effendi, *ibid*, hlm 172.

¹⁶ Pasal 183 KUHAP menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

¹⁷ Tolib Effendi, *op.cit*, hlm. 173.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian, alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mempunyai nilai kekuatan pembuktian, diantaranya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Nilai Kekuatan Alat-Alat Bukti

No.	Alat-alat Bukti	Nilai Kekuatan pembuktian
1.	Keterangan Saksi	Diterima sebagai alat bukti sah; Mempunyai nilai kekuatan bebas; Bergantung pada penilaian hakim; Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi <i>a de charge</i> .
2.	Keterangan Ahli	Nilai kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, serta penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan pada hakim.
3.	Surat	Pembuktiannya bebas, nilai kekuatan pembuktiannya tidak mengikat atau menentukan, dan penilaiannya terserah hakim.
4.	Petunjuk	Nilai kekuatan pembuktiannya bebas, karena Penilaian kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim, setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya. ¹⁸
5.	Keterangan Terdakwa	Nilai kekuatan pembuktiannya bebas, hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh.

4. Asas-Asas Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Asas hukum merupakan landasan atau dasar segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap peristiwa konkret. Namun, dapat

¹⁸ Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya”.

diterapkan dalam suatu penemuan hukum (*Rechtsvinding*).¹⁹ Suatu asas hukum apabila secara tegas tertuang dalam Undang-undang, maka mempunyai kekuatan mengikat sehingga hakim berkewajiban untuk menerapkan asas terhadap kasus-kasus konkret yang tidak terdapat aturan-aturan khusus. Sebagaimana asas-asas pembuktian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana, yaitu :

a. *Due Procces of Law*

Berkaitan dengan pembuktian, *Due Procces of Law* memiliki keterkaitan dengan cara memperoleh, mengumpulkan, dan cara menyampaikan bukti di pengadilan atau *bewijsvoering*.²⁰

b. *Presumption of innocent*

Asas yang menyatakan seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah mempunyai kekuatan hukum. Asas ini berkaitan dengan suatu beban pembuktian. Karena seseorang tidak bersalah, beban pembuktiannya terdapat pada jaksa yang mendakwakan seseorang telah terbukti melakukan atau tidak melakukan tindak pidana.²¹

c. *Clear and convincing Evidence*

Clear and convincing Evidence disebut sebagai standar pembuktian antara standar *preponderance of evidence* yaitu cukupnya alat bukti (perkara perdata) dan *beyond a reasonable doubt* artinya di luar tingkat keraguan yang masuk akal (perkara

¹⁹ Abdul Rahmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 90.

²⁰ Eddy O.S Hiariej, **Teori & Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 21.

²¹ Eddy O.S Hiariej, *ibid*, hlm. 33.

pidana). Maksudnya, Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dan tanpa adanya keraguan yang masuk akal kepada hakim terkait kesalahan terdakwa.²²

d. Unus testis nullus testis

Maksud asas ini adalah seorang saksi bukanlah saksi. Dalam konteks pembuktian tindak pidana dibutuhkan minimal dua orang saksi. Asas ini mempunyai hubungan dengan bukti minimum dalam proses pembuktian di persidangan.²³

e. Unlawful Legal Evidence

Maksudnya adalah bukti yang diperoleh tidak sah. Asas ini berkaitan dengan *bewijsvoering* yaitu cara ataupun proses memperoleh hingga menyampaikan bukti di persidangan.

f. Audi Et Alteram Partem

Secara harfiah artinya hakim dalam mengadili harus mendengarkan kedua belah pihak. Asas ini memang secara tidak langsung berkaitan dengan pembuktian, namun berkaitan dengan beban pembagian pembuktian itu sendiri.²⁴

²²Eddy O.S Hiariej, *ibid*, hlm. 42.

²³ Eddy O.S Hiariej, *ibid*, hlm. 46.

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Ibid*, hlm. 47.

B. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi

1. Pengertian Saksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan:

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat suatu kejelasan bahwa saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan harus berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan alami sendiri suatu peristiwa pidana.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang ditentukan lain pada Undang-undang maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi, sebagaimana dalam Pasal 168 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu terdiri dari:

- 1) Keluarga sedarah/semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga nenek mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak terdakwa sampai derajat ketiga;
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas terkait yang tidak bisa menjadi saksi, berikut terdapat beberapa macam yang dapat menjadi saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi yang memberatkan (saksi *a Charge*)

Saksi yang memberatkan atau *a charge* adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi memberatkan.²⁵

2. Saksi yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan atau *a de Charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Terdakwa berhak mengajukan saksi yang memiliki keahlian yang berguna untuk memberikan keterangan yang menguntungkan atau meringankan baginya.²⁶

3. Saksi Ahli

Seorang ahli yakni yang telah dinyatakan dalam pasal 186 KUHP ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan. Namun, keterangan ahli juga dapat diberikan saat tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang dinyatakan dalam laporan, serta keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah.²⁷

²⁵Hukum Online, **Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota-dan-alibi>, Di akses pada tanggal 18 Januari 2018.

²⁶ Pasal 65 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

²⁷ Penjelasan Pasal 186 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

4. Saksi Mahkota (*Kroon Getuige; Crown Witness*)

Bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.²⁸ Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahannya.

5. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

Justice Collaborators adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di Persidangan.²⁹

2. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang diberikan pada saat ia memberikan kesaksiannya dipersidangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri suatu peristiwa pidana.³⁰ Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

²⁸ Putusan Mahkamah Agung (No. 1989K/Pid.Sus/1989)., Tanggal 6 Agustus 1989.

²⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia (SEMA) Nomor 04 tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu

³⁰ Pasal 1 Angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi di persidangan, karena dengan alat bukti keterangan saksi akan lebih mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Namun tidak semua keterangan saksi bisa menjadi alat bukti yang sah. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat sah berikut :

- 1) Syarat Formil yaitu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah apabila diberikan dengan sumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi yang tidak disumpah maka hanya boleh digunakan sebagai tambahan kesaksian.
- 2) Syarat Materiil keterangan saksi harus terdiri lebih dari seorang, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*). Namun, keterangan seorang saksi adalah cukup untuk alat bukti apabila terdapat salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.³¹

Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa suatu keterangan alat bukti akan mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila sebelum memberikan kesaksiannya telah melakukan sumpah terlebih dahulu serta keterangan saksi harus memenuhi minimum pembuktian.

³¹ Darwin Prinst, *op.cit*, hlm 139.

C. Tinjauan Umum Tentang *Testimonium de auditu*

1. Pengertian *Testimonium de auditu*

Testimonium de auditu dengan kata lain *hearsay*³² merupakan suatu keterangan dari seseorang di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran peristiwa pidana yang diperoleh dengan cara mendengarkan atau diceritakan dari orang lain mengenai suatu peristiwa pidana dapat juga dikatakan sebagai kesaksian tidak langsung.³³ Jadi, keterangan yang diperoleh dari orang lain disebut bukti tidak langsung (*second hand evidence*), karena *testimonium de auditu* sama halnya dengan report, gosip, atau rumor.³⁴

Terdapat suatu argumentasi antara Pro dan Kontra terkait *Testimonium de auditu*, yaitu diuraikan dalam tabel berikut³⁵:

Tabel 4
Pro Dan Kontra Terkait *Testimonium de auditu*

PRO	KONTRA
1) Dengan menggunakan saksi <i>de auditu</i> maka tidak satu pun bahan bukti yang hilang; 2) jika keterangan <i>de auditu</i> diabaikan, maka tidak akan mendapatkan kejelasan terkait peristiwa pidana; 3) jika saksi <i>de auditu</i> di pergunakan dalam proses pembuktian, maka dapat memperkuat keyakinan hakim.	1) Memungkinkan pembuktian dari tangan kedua dan ketiga; 2) keterangan saksi hanya akan mempunyai nilai jika diberi berdasarkan sumpah; 3) bahwa suatu pelaksanaan pembuktian lebih dominan dilakukan oleh penyelidik atau polisi.

³² *Hearsay* berasal dari kata *Hear* yang berarti mendengar dan *say* artinya mengucapkan. Secara harfiah, *hearsay* berarti mendengar dari ucapan orang lain. (dalam Dr. Munir Fuady S.H., M.H., LL.M, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 132)

³³ Andi Hamzah, *Op.cit.* hlm. 264.

³⁴ Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 132.

³⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm, 268.

2. Kekuatan *Testimonium de auditu*

Pada Umumnya, *testimonium de auditu* ditolak atau tidak digunakan sebagai alat bukti. Menolak atau tidak menggunakan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti termasuk aturan umum (*general rules*) yang sampai saat ini masih dianut para praktisi. Suatu saksi akan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas (*vribewijs kracht*) apabila telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Maksudnya, hakim memiliki kebebasan untuk menilai kesaksian sesuai dengan nuraninya, hakim tidak terikat dengan keterangan saksi karena hakim dapat mengaibakan keterangan saksi dengan memberikan dasar hukum yang logis dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Hakim dapat menerima keterangan *testimonium de auditu*, asalkan keterangan tersebut sesuai dengan fakta-fakta peristiwa pidana dan asal atas dasar eksepsional untuk menerimanya.³⁶

Terkait nilai kekuatan dalam pembuktian, *testimonium de auditu* dapat melengkapi asas *unus testis nullus testis* maksudnya yaitu bahwa suatu saksi harus ada lebih dari satu seorang saksi, karena jika hanya satu saksi saja maka kesaksiannya tidak dapat diterima. Maka, disinilah letak kekuatan pembuktian *testimonium de auditu* bahwa dapat menguatkan keterangan saksi lainnya yang beridiri sendiri agar dapat diterima kesaksiannya.

3. Keberadaan *Testimonium de auditu*

Keberadaan *Testimonium de auditu* dalam praktik peradilan di Indonesia, dapat kita lihat dengan adanya putusan pengadilan yang menerima keberadaan

³⁶ Asmuni, *Testimonium de auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 194.

testimonium de auditu dan ada pula yang menolak, sebagaimana putusan pengadilan berikut:³⁷

- 1) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970, tanggal 5 mei 1971. Menyatakan: “Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain (*de auditu*) tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, didalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.” (M. Ali Budiarto, 2005: 158). Jadi, mayoritas putusan pengadilan indonesia menolak keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, bahkan juga tidak digunakan sebagai bukti persangkaan maupun alat bukti petunjuk.
- 2) Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959. Menyatakan: “Kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian ini dapat digunakan sebagai bukti persangkaan, yang dapat dibuktikan sesuatu fakta. Hal yang demikian tidaklah dilarang.” (M. Ali Budiarto, 2005; 157). Jadi, hakim menggunakan kesaksian *testimonium de auditu*, walaupun tidak digunakan sebagai bukti langsung.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua pengadilan menerima *testimonium de auditu*, akan tetapi terdapat pengadilan yang menerimanya baik lewat bukti persangkaan (hukum acara perdata) maupun bukti petunjuk (hukum acara pidana) maupun dengan alasan-alasan lainnya.³⁸

³⁷ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 148-149.

³⁸ Munir Fuady, *ibid*, hlm. 149.

D. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi

1. Pengertian Umum Kasasi

Upaya hukum yakni yang telah dinyatakan dalam pasal 1 angka 12 KUHAP yaitu “hak terdakwa maupun penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding maupun kasasi serta hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Upaya hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:³⁹

- 1) Upaya hukum biasa yang merupakan upaya hukum dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya atau penuntut umum untuk memohon mengadili atau memutus kembali suatu perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri yang diajukan ke pengadilan Tinggi yang pada umumnya disebut upaya hukum banding, serta terdakwa atau penasehat hukumnya atau penuntut umum memohon mengadili atau memutus kembali suatu perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi yang permohonannya diajukan ke Mahkamah Agung maka disebut Upaya hukum Kasasi. Serta, Upaya hukum biasa juga terdiri dari upaya hukum perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri;
- 2) Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau ahli warisnya terhadap suatu putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

³⁹ Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 110.

Mengacu pada upaya hukum kasasi yang merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa ataupun penuntut umum, tergantung pihak berperkara menggunakan ataupun tidak menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang tersebut.⁴⁰ Dimana upaya hukum ini dilakukan karena pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Tujuan utama dari upaya hukum kasasi itu sendiri antara lain untuk membenarkan terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru, serta bertujuan untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.⁴¹ Dalam mengajukan kasasi, pemohon harus memenuhi syarat bahwa pemohon harus mengajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan pengadilan yang dikasasi. Jika melebihi tenggang waktu maka haknya gugur untuk mengajukan kasasi. Upaya hukum kasasi dilakukan pemeriksaan oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim Agung serta pemeriksaannya berdasarkan perkara.

2. Alasan Permohonan Kasasi

Alasan kasasi harus sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka dari itu alasan kasasi yang tidak menurut undang-undang tidak dapat dibenarkan, untuk mengetahui hal tersebut penulis menguraikannya sebagaimana berikut:

⁴⁰ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 (cetakan ke-13), hlm. 537.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm. 539.

a. Alasan kasasi yang dibenarkan menurut Undang-Undang

Alasan kasasi telah ditentukan dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, dimana pemohon tidak dapat mengajukan kasasi apabila alasannya tidak berdasarkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Alasan kasasi yang dapat diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum kasasi ialah yang terdapat dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana semestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan alasan kasasi yang telah disebutkan diatas, maka diluar alasan kasasi ini keberatan kasasi dapat ditolak karena tidak dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, dalam mengajukan permohonan kasasi harus memperhatikan keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi.⁴²

b. Alasan kasasi yang tidak dibenarkan Undang-undang

Alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang adalah alasan kasasi yang sabagaimana berikut:⁴³

⁴² M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm. 565.

⁴³ M. Yahya Harahap, *ibid*, hlm. 567-573.

- 1) Keberatan kasasi putusan Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri. Maksudnya, walaupun pemohon kasasi mengajukan alasan keberatan kasasi yang sedemikian adalah hal yang percuma karena hal itu tidak merupakan kesalahan penerapan hukum serta tidak merupakan melampaui batas wewenang. Namun Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri masih dalam batas wewenang;
- 2) Keberatan atas nilai pembuktian hal ini termasuk diluar alasan kasasi yang dibenarkan dalam pasal 253 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berhak menilainya dalam pemeriksaan tingkat kasasi.
- 3) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta, alasan seperti ini sudah jelas tidak dibenarkan Undang-undang. Maksud pengulangan fakta itu sendiri yakni mengulang kembali peristiwa yang pernah dikemukakan dalam pemeriksaan di pengadilan maupun dalam memori banding.
- 4) Alasan Kasasi tidak menyangkut permohonan perkara. Alasan kasasi seperti ini dianggap tidak berkaitan karena tidak sesuai dengan permasalahan.
- 5) Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda yang mana keberatan seperti ini tidak dibenarkan dalam Undang-undang. Sebab, Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah wewenang pengadilan yang tidak terikat dengan pemeriksaan kasasi.
- 6) Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti tidak dapat dibenarkan karena pengembalian barang bukti dalam peradilan pidana adalah wewenang pengadilan.

- 7) Keberatan kasasi mengenai *Novum* maksudnya suatu hal yang diajukan kasasi dalam keberatan yang tidak pernah diperiksa dan diajukan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Alasan keberatan seperti ini dianggap “hal baru ataupun *novum*”.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern, yang pada dasarnya menguji norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.⁴⁴ Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Mengenai keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan juga oleh ketentuan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi (*constitutional court*).

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yaitu untuk Menguji Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga

⁴⁴ Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 3.

negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan beberapa peradilan dibawahnya. Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara konstitusi harus tunduk juga pada No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam pengujian Undang-undang adalah bersifat *declatoir constitutief*. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi memuat suatu fakta-fakta dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan untuk memutuskan apakah menolak permohonan, permohonan tidak diterima atau permohonan dikabulkan. Dalam memutuskan permohonan, harus menempuh musyawarah yang dilakukan oleh hakim konstitusi yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dalam sidang pleno, apabila tidak tercapai suatu kesepakatan dalam musyawarah maka putusan ditentukan melalui voting

atau suara terbanyak. Hakim konstitusi yang berbeda pendapat tetap akan dimuat dalam putusan yang biasanya disebut *dissenting opinion*.⁴⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi berupa suatu putusan normatif yang merupakan putusan yang di dasarkan pada legalitas hukum terkait persidangan, serta berupa putusan progresif yang mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terpaku pada Undang-undang dalam mengadili suatu perkara untuk mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan yang substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan negatif (meniadakan Undang-undang) dan putusan yang positif (menciptakan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negatif apabila suatu Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif ketika Mahkamah Konstitusi memberikan putusan diluar wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, seperti adanya *ultra petita* yang merupakan penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Hal ini yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan bersama.⁴⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 kekuatan, yaitu:⁴⁷

⁴⁵Ilmu hukum, **Putusan Mahkamah konstitusi**, <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.co.id/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>, diakses pada tanggal 1 April 2018

⁴⁶Aninditya Eka Bintari, **Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara**, *Pendecta Research Law Journal*, Volume 8 No. 1 Januari 2013, hlm. 89.

⁴⁷Maruarar Siahaan, *Op,cit*, Hlm. 214

1) Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yaitu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh serta mengikat bagi siapapun. Sedang, mengikat dalam arti positif bahwa apa yang telah diputuskan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan.

2) Kekuatan Pembuktian

Dalam perkara konstitusi yang putusannya bersifat *erga omnes*, maka permohonan pengujian yang berkaitan dengan materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun..

3) Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah putusan di maksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa, untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyak orang membantahnya.

Perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menciptakan suatu putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum

Acara Pidana terkait Saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27 KUHAP. Dimana Hakim Mahkamah Konstitusi pada intinya memperluas pengertian saksi yaitu “Orang yang dapat memberikan keterangan atas suatu peristiwa pidana tidak selalu ia dengar, lihat, dan alami sendiri”. Perluasan makna tersebut disebabkan dengan diakuinya saksi yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dipersidangan.

3. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai kesamaan dengan badan peradilan lainnya, dimana harus tunduk pada asas-asas peradilan yang baik dalam Undang-undang Hukum Acara, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan asas-asas yang juga diakui secara universal. Asas-asas tersebut antara lain:⁴⁸

1. Persidangan Terbuka Untuk Umum

Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menentukan secara khusus bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim. Keterbukaan sidang ini merupakan salah satu bentuk sosial kontrol dan juga bentuk akuntabilitas hakim.

2. Independen dan Imparsial

Pasal 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Terkait

⁴⁸ Maruarar Siahaan, *Op. cit*, Hlm. 44.

independensi sangat berkaitan dengan sikap imparisial atau tidak memihak hakim baik dalam pemeriksaan maupun pengambilan keputusan.

3. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, Dan Murah

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman⁴⁹ menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sedangkan biaya murah adalah biaya perkara yang terpicul oleh rakyat.

4. Hak Untuk Didengar Secara Seimbang (*Audi et Alteram Partem*)

Dalam perkara yang diperiksa dan diadili di peradilan, kedua pihak penggugat ataupun tergugat mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangannya secara berimbang dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing pihak.

5. Hakim Aktif dan juga Pasif dalam Proses Persidangan

Asas ini sesungguhnya dapat dilihat paradoks, karena sikap pasif sekaligus aktif harus dianut hakim. Akan tetapi, adanya karakteristik khusus perkara konstitusi yang kental dengan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan telah menyebabkan proses persidangan tidak dapat diserahkan melulu pada inisiatif para pihak.

⁴⁹ Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* yang bukan hanya *know-about*, yang digunakan dalam memecahkan isu hukum yang dikaji.¹ Pada bab penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif yang pada umumnya dapat disebut penelitian hukum doktriner maupun penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu cara untuk menemukan kebenaran dari sisi normatif berdasarkan logika ilmu hukum.² Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis maupun bahan-bahan hukum yang lain. Dalam penulisan ini, penelitian ini berfokus pada norma hukum positif dan mempelajari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan keterangan saksi yang bersifat *Testimonium de auditu* dalam pembuktian.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang selaras dengan penelitian hukum normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah hukum pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 60.

² Johny Ibrahim, **Teori Metode & Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, 2005, hlm.

yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tinjauan pokok dalam pendekatan kasus adalah *Ratio Decidendi* yaitu alasan hukum atau pertimbangan hukum hakim untuk sampai kepada suatu putusan dan dapat digunakan sebagai referensi sebagai penyusunan argumentasi dalam memecahkan isu hukum, dimana *ratio decidendi* ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.³ Selain itu, penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan perUndang-undangan (*statute approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa Undang-undang atau peraturan hukum yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan hukum penelitian. Serta, menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin yang dapat membantu menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, asas hukum yang berhubungan dengan isu hukum di tangani.⁴

Dengan itu, beberapa pendakatan yang saya gunakan dapat membantu dalam menemukan dan memecahkan permasalahan terkait *testimonium de auditu* dalam pembuktian di pengadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam memecahkan permasalahan hukum diperlukan suatu sumber hukum agar dapat mempermudah penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif dengan

³ Peter Mahmud Marzuki, *op,cit*, hlm. 133.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 135.

menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan dan putusan hakim yang termasuk bahan hukum yang mempunyai otoritas. Serta, bahan hukum sekunder yang berupa suatu bahan yang memberikan penjelasan hukum. Berikut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang penulis gunakan:⁵

1) Bahan Hukum Primer, di idalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari peraturan perUndang-undangan dan putusan-putusan yang berkaitan dengan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* dalam pembuktian, yang terdiri atas:

- a. Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27, Pasal 184 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014.

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan kamus hukum.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, dan sekunder diperoleh dengan cara yang dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Agar mendapatkan bahan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm. 181.

hukum yang dibutuhkan maka peneliti melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dengan cara mencari, mengumpulkan, membaca, memahami, mengutip, kemudian mengkaitkan bahan hukum dengan permasalahan dalam penelitian lalu menguraikan bahan hukum tersebut. Penelusuran bahan hukum juga diperoleh dari jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari internet seperti *google scholar*, jurnal hukum, maupun jurnal konstitusi dengan cara mencari, membaca, serta mengutip bahan yang terdapat dalam jurnal tersebut yang berkaitan dengan permasalahan.

E. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum secara sistematis yang dapat disebut interpretasi sistematis yang berguna untuk memudahkan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Kemudian, hasil analisa bahan hukum yang dilakukan secara sistematis akan diinterpretasikan menggunakan interpretasi gramatikal.

Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) merupakan suatu penafsiran dengan memperhatikan bahan hukum secara sistematis yang bertujuan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Selanjutnya, interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran hukum pada suatu makna teks yang ada dalam kaidah hukum yang dinyatakan. Penafsiran gramatikal merupakan upaya untuk menafsirkan dan memahami suatu

teks Undang-undang maupun perjanjian. Berdasarkan dari hasil interpretasi tersebut dapat memperoleh suatu kesimpulan mengenai Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium de auditu* Dalam Pembuktian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

F. Definisi Konseptual

- 1) *Testimonium de auditu* dengan kata lain *hearsay* merupakan suatu keterangan dari seseorang di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran peristiwa pidana yang diperoleh dengan cara mendengarkan atau diceritakan dari orang lain mengenai suatu peristiwa pidana.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat *declatoir constitutief*. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan atau meniadakan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagaimana kedudukannya sebagai *negative legislator*.
- 3) Pembuktian merupakan proses kegiatan di pengadilan dalam menemukan kebenaran suatu fakta-fakta dari peristiwa pidana yang terjadi, yang dilakukan agar mendapatkan kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti untuk mengetahui benar atau tidaknya telah terjadi tindak pidana.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014

1. Duduk Perkara

Pada tahun 2012 di Desa Sogian, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Terdapat kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama H. Imam yang dilakukan terhadap Husnul Hotimah (saksi korban). Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya sekali namun berkali-kali telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Pasal 289 KUHP. Kasus ini terungkap semenjak saksi korban yaitu husnul hotimah melaporkan perbuatan terdakwa. Awalnya kasus ini telah diproses oleh Pengadilan Negeri Sampang dengan nomor perkara 55/Pid.sus/2013/PN.Spg dalam amar putusan menetapkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencabulan berlanjut. Penyelesaian kasus ini pun masih berlanjut, karena pihak terdakwa mengajukan permintaan banding dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 636/Pid/2013/PT.Sby yang amar putusannya menerima permintaan banding terdakwa serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 55/Pid.sus/2013/PN.Spg. Namun, terdakwa menolak Putusan *Judex facti* sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yaitu adanya putusan No. 737 K/Pid/2014.¹

¹ Putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014

2. Pihak :

a. Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Nama : H. Imam

Tempat Lahir : Sampang

Umur/tanggal lahir : 12 Juni 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa sogian, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

b. Alasan Permohonan Kasasi :

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi, pada intinya terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa *judex facti* telah membuat putusan berdasarkan atas pertimbangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi yang hanya diajukan oleh Husnul Hotimah selaku Pelapor dalam perkara a quo; yang ternyata berdasarkan fakta persidangan kesemuanya saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mengalami serta tidak pernah menyaksikan peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, bahwa saksi Moh. Fadurrahman, saksi Fadilah maupun saksi Satumi kesemuanya merupakan saksi-saksi "*Testimonium de auditu*"; alias bukan merupakan saksi fakta.

Bahwa keterangan Husnul Hotimah secara pribadi yang berdiri sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi

bersalah; karena pertimbangan hukum pembuktian yang dipakai *Judex facti* hanya mendasarkan dari pengakuan Husnul Hotimah pribadi semata yang berdiri sendiri, yang dalam asas hukum pembuktian disebut sebagai satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Bahwa pertimbangan *Judex facti* yang mendasarkan pertimbangannya dari keterangan *testimonium de auditu*, telah nyata-nyata menyimpang dari ketentuan Pasal 1 butir 27 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahwa *Judex facti* telah membuat pertimbangan Hukum yang didasarkan atas petunjuk yang hanya didasarkan atas analogi pemikiran semata yang bukan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan.

Dalam usaha menemukan kebenaran materiel, *Judex facti* tentunya berkewajiban untuk mengutamakan fakta-fakta guna menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain, dalam hal ini dibutuhkan logika. Pada usaha menemukan kebenaran materiel tersebut, biasanya digunakan hipotesa atau dugaan-dugaan. Dari hipotesa inilah haruslah ditemukan pembuktian yang logis dengan keharusan menjunjung tinggi serta mengutamakan fakta-fakta yang berdasar pada aturan hukum pembuktian. Kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang muncul selama dan dalam proses persidangan haruslah dijadikan dasar guna membentuk konstruksi hukum yang logis pula, agar supaya tidak melahirkan suatu putusan yang sesat dan menyesatkan.

- 3) Bahwa *Judex facti* telah keliru dalam menilai barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). *Judex facti* telah mengabaikan nilai persesuaian antara keterangan saksi Solihin; saksi Dwi Nurmalasari ; serta saksi Hajah Jumaliyah yang dengan jelas menyebutkan bahwa uang sebesar Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang tali asih yang sudah dijanjikan saksi Dwi Nurmalasari yang akan diberikan kepada Husnul Hotimah karena selama itu telah ikut membantu pekerjaan rumah tangga saksi Dwi Nurmalasari.

Apabila keterangan Husnul Hotimah dianggap sebagai keterangan saksi korban, tentunya hal ini terbantahkan oleh ketentuan KUHAP yang pada intinya menyatakan kesalahan terdakwa tidak cukup dibuktikan hanya berdasarkan keterangan saksi saja.² Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut secara jelas dan terang menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi Pelapor saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, apalagi tidak disertai dengan bukti lain yang secara langsung mengandung hukum sebab akibat/causa prima dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Incasu uang sejumlah Rp500.000,00 tersebut tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan apapun (tidak mengandung causa prima/sebab akibat) dengan Terdakwa/Pemohon.

- 4) Bahwa *Judex facti* telah menjadikan transfer rekaman DVD sebagai bukti dalam persidangan, padahal dengan jelas KUHAP tidak

² Pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan : “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

mengatur mengenai pembuktian dengan transfer rekaman yang keaslian dari rekaman tersebut tidak pernah bisa dibuktikan di persidangan. *Judex facti* jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang sesat dan menyesatkan karena hanya didasarkan atas keterangan Husnul Hotimah yang berdiri sendiri; sementara *Judex facti* sama sekali tidak mempertimbangkan persesuaian saksi Zubaidah ; saksi Dwi Nurmalasari maupun saksi Solihin yang menerangkan tidak mengenal suara dalam transfer rekaman DVD berdurasi 43,55 menit.

- 5) Bahwa *Judex facti* kurang jeli dalam menilai hasil *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan gambaran umum dari keadaan subjek *visum*; yang harusnya menjadi pertimbangan adalah apa penyebab dari luka tersebut; serta harus dapat dibuktikan mengenai sebab musabab luka tersebut terjadi; apakah dapat dibuktikan ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa atau tidak; dalam hal ini untuk membuktikan kebenaran materiil penyebab dilakukannya *visum* dimaksud tentunya berpijak pada hukum pembuktian juga.
- 6) Bahwa dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum; *Judex facti* tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Dengan jelas bahwa keterangan saksi Moh. Fadhurrohman dan keterangan saksi Satumi maupun keterangan saksi Fadilah yang diperoleh karena hanya mendengar cerita Husnul Hotimah bukanlah alat bukti yang sah karena kesemuanya merupakan saksi yang bersifat *Testimonium de auditu*.

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung Berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, Putusan *Judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti mencabuli korban Husnul Hotimah sebanyak tiga kali yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan, dengan memeluk, mencium bibir dan memegang payudara korban dalam waktu yang berbeda. Memang tidak ada bukti saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, karena perkara *a quo* adalah perkara kesusilaan yang tidak mungkin dilakukan di hadapan umum, akan tetapi dari rangkaian peristiwa yang terbukti di persidangan diperoleh paling tidak 4 (empat) bukti petunjuk dan adanya barang bukti sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim, bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap saksi korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat tinggal Terdakwa, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 289 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

- b. Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 636/PID/2013/PT. SBY tanggal 16 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang No. 55/Pid.B/2013/PN.Spg tanggal 27 Agustus 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, berdasarkan pertimbangan alasan-alasan yang memberatkan lebih banyak daripada alasan-alasan yang meringankan dan ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa adalah 9 (sembilan) tahun penjara. Disamping itu terdapat alasan memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex facti*, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

4. Amar Putusan Hakim Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: H. IMAM tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 636/PID/2013/PT. SBY tanggal 16 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Sampang No. 55/Pid.Sus/2013/PN.Spg tanggal 27 Agustus 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa H. IMAM tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan secara berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. IMAM tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dikembalikan kepada yang berhak;
 - Sekeping kaset CD rekaman percakapan dan rekaman telpon antara keluarga Husnol Hotimah dengan anak H.IMAM yang bernama DWI NURMALASARI yang berisi permintaan maaf dari keluarga H.IMAM kepada Husnol Hotimah dan keluarganya atas perbuatan H. IMAM, terlampir dalam berkas;

B. Kedudukan Keterangan Saksi yang Bersifat *Testimonium de auditu* dalam Pembuktian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010

1. Keterangan *Testimonium de auditu* dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pengaturan alat-alat bukti dalam Hukum Acara Pidana sudah ditentukan secara limitatif dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Artinya, tidak boleh ada alat bukti yang lain selain yang ditentukan dalam Undang-undang. Alat-alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP yang antara lain terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam proses pembuktian hukum acara pidana di persidangan, peran saksi dan keterangan saksi sangat penting sebagai alat bukti. Hal ini dapat kita lihat urutan pertama alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Definisi saksi dan keterangan saksi secara tegas diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*”. Sedangkan, Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP mengenai keterangan saksi itu sendiri ialah bahwa “*keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*”.

Sebagaimana kedudukan keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam Hukum Acara Pidana. Dalam menangani perkara pidana tidak pernah luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki kedudukan penting dalam pembuktian. Agar terjamin suatu kebenaran keterangan saksi, maka saksi harus melakukan sumpah terlebih dahulu bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana dalam ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP. Apabila saksi memberikan keterangan maupun sumpah palsu maka saksi tersebut dapat dijerat Pasal 242 KUHP.³ Adanya ancaman pidana terhadap perbuatan ini, maka akan menjamin saksi memberikan keterangan yang sebenarnya. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang dilakukan didepan sidang pengadilan terkait peristiwa pidana berdasarkan yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam Hukum Acara Pidana, saksi dan keterangan saksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Namun, terdapat suatu saksi yang keterangannya diperoleh berdasarkan apa yang yang tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri suatu peristiwa yang di dalam hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Pada umumnya *testimonium de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti di Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan hukum acara pidana untuk

³Pasal 242 KUHP menyatakan “barang siapa dalam keadaan di mana Undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

mencari kebenaran materiil karena keterangan saksi yang diperoleh dari mendengar dari orang lain saja tidak menjamin kebenarannya.⁴

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan yang melarang *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti, diantaranya dalam ketentuan sebagaimana berikut:

Pasal 1 angka 26 dan KUHAP menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memeberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.”

Pasal 1 Angka 27 KUHAP menyatakan :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

*“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.*⁵

Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan :

“Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”.

Terkait keterangan *testimonium de auditu* yang pada prinsipnya tidak digunakan sebagai alat bukti, karena *testimonium de auditu* memiliki beberapa kelemahan, yaitu karena: *Testimonium de auditu* tidak dapat dibedakan antara kesaksian yang benar, gosip, atau rumor belaka; *testimonium de auditu* tidak dapat meghadirkan saksi yang sebenarnya ke pengadilan untuk di dengar oleh hakim dan para pihak, *testimonium de auditu* tidak berhadapan dengan pihak yang

⁴ Andi Hamzah, *loc.cit*, hlm. 265.

⁵ Penjelasan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

menegalami sendiri dari kesaksian itu, Karena saksi yang sebenarnya tidak mengucapkan sumpah di pengadilan sehingga kebenarannya menjadi berkurang, karena saksi yang sebenarnya tidak hadir di pengadilan, sehingga tidak dapat diketahui sejauh mana kebenarannya, karena problem ambiguitas bahasa. Dalam hal ini, tidak diketahui kebenaran yang dimaksudkan ketika mengucapkan suatu kata, serta karena saksi tidak hadir di pengadilan yang terbuka untuk umum, padahal jika saksi hadir di pengadilan yang terbuka untuk umum maka saksi akan segan untuk berbohong.⁶

2. Keterangan *Testimonium de auditu* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu menguji Undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara; memutus pembubaran partai politik; serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.⁷ Suatu putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.⁸ Perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menciptakan suatu putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum

⁶ Munir Fuady, *op,cit*, hlm. 133

⁷ Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

mengikat, sebagaimana salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang telah menjadi sumber hukum acara pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 memperluas definisi saksi dan keterangan saksi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27 KUHAP, dimana putusan ini berawal dari perkara Yusril Ihza Mahendra yang sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum di Depkumham. Lahirnya putusan ini ketika permintaan Yusril Ihza Mahendra ditolak untuk menghadirkan empat saksi menguntungkan baginya yakni terdiri dari mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Presiden Koordinator perekonomian Kwik Kian Gi, dan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Permintaan tersebut ditolak alasannya empat orang saksi tersebut bukan kategori saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana.⁹ Penolakan tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Sehingga, Yusril Ihza mahendra mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan permohonan tersebut sebagian telah dikabulkan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada intinya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan :

- 1) Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang

⁹Hukum Online, **Yusril Ihza Mahendra Minta MK Tafsirkan Definisi ‘Saksi’ dalam KUHAP**, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cceada4af703/Yusril_Ihza_Mahendra-minta-mk-tafsirkan-definisi-saksi-dalam-kuhap, Diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;

- 2) Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”*;

Jadi, Inti dari Amar putusan tersebut menyatakan bahwa arti penting saksi dan keterangan saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya

dengan peristiwa pidana. Jadi, dalam hal ini dapat disebut sebagai *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Dalam Praktik Peradilan, terkait saksi terdapat beberapa jenis saksi yang terdiri dari saksi memberatkan (*a charge*), saksi meringankan (*a de charge*), saksi mahkota, saksi ahli, dan saksi kolabolator. Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-undang Dasar 1945, secara tidak langsung Majelis Hakim Konstitusi menambahkan jenis saksi yaitu saksi yang tidak mendengar, melihat, atau tidak mengalami sendiri suatu peristiwa yang pada umumnya disebut sebagai *testimonium de auditu* dengan itu peran saksi *testimonium de auditu* diakui sebagai alat bukti di persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 mengakui saksi *testimonium de auditu* dalam peradilan pidana sebagai cerminan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara Pidana. Ini artinya, terbuka peluang saksi *testimonium de auditu* tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memperbolehkan diadikannya *testimonium de auditu* dalam suatu persidangan.

Pada prinsipnya, kesaksian *testimonium de auditu* memang tidak diakui keberadaannya sebagai alat bukti, karena menganggap kesaksian ini tidak terjamin kebenarannya. Terdapat suatu keberatan yang disangsikan dari kesaksian *testimonium de auditu* sehingga sulit diterima sebagai alat bukti penuh, baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental maupun dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Keberadaan *Testimonium de auditu* memang tidak sepenuhnya diakui,

dengan kata lain hanya diakui sebagai alat bukti tidak langsung (*second hand evidence*)¹⁰. Walaupun *Testimonium de auditu* tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, namun Terdapat faktor-faktor yang membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, yaitu saksi yang kesaksiannya diperoleh dari saksi fakta yang telah meninggal; Peristiwa hukum tersebut tidak dapat dituliskan dalam bentuk dokumen yang dapat dibaca atau dilihat kembali; dan Keterangannya merupakan pesan dari saksi-saksi fakta yang terlibat dalam peristiwa pidana.¹¹

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi memang harus memiliki relevansi dengan peristiwa pidana. Relevansi antara suatu keterangan dengan peristiwa pidana memiliki peran penting dalam sistem pembuktian agar suatu keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk mengetahui keterangan saksi relevan atau tidak dengan peristiwa pidana, pertimbangan hakim sangat menentukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang berdasarkan dengan logika maupun keyakinan hakim.¹²

Dalam konteks pembuktian, untuk mengetahui tindak pidana benar-benar terjadi atau terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, keberadaan *testimonium de auditu* sangatlah penting untuk menambah keyakinan hakim bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana. Maka dari itu, keterangan

¹⁰ Penjelasan “Bukti tidak langsung (*second hand evidence*) merupakan pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, yang diperoleh sebagai kesimpulan dari peristiwa yang sedang dalam proses di pengadilan, lawan dari bukti tidak langsung yaitu bukti langsung (*original evidence*) yang merupakan alat bukti yang diajukan langsung secara fisik oleh pihak yang bersangkutan di pengadilan yang terdiri dari alat bukti surat dan alat bukti saksi. (Hukum Online, **Arti Alat Bukti Tidak Langsung**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a824ec03c369/arti-alat-bukti-tidak-langsung>, Diakses pada tanggal 28 Maret 2018).

¹¹ Asmuni, *Op.cit.*, hlm. 196.

¹² Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 25.

testimonium de auditu seharusnya tidak boleh ditolak sebagai alat bukti begitu saja. Sebaiknya, keterangan *testimonium de auditu* diterima saja dulu sebagai alat bukti dengan mempertimbangkannya dan menganalisisnya apakah dasar eksepsional untuk diterima sebagai alat bukti.

Praktik peradilan Indonesia mengakui *testimonium de auditu*, diantaranya:

a. Diakui secara eksepsional

Secara eksepsional yang mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan alasan bahwa eksepsional bisa dibenarkan dalam *common law*. Misalnya, apabila saksi fakta peristiwa pidana meninggal dunia dan sebelumnya saksi tersebut terlebih dahulu menceritakan peristiwa pidana kepada orang lain. Kemudian peristiwa pidana tersebut tidak dapat terungkap karena meninggalnya saksi fakta tersebut, maka dengan hal ini *testimonium de auditu* dapat diterima secara eksepsional sebagai alat bukti.¹³ *Testimonium de auditu* secara eksepsional dapat diakui sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat materiil dengan melaksanakan sumpah atas kesaksiannya tersebut.

b. Dikonstruksi sebagai persangkaan

Konstruksi itu sendiri maksudnya adalah persangkaan yang merupakan kesaksian yang tidak mengenyampingkan aturan umum (*general ruler*) yang melarang menerima keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Secara kasuistik hakim dapat mengkonstruksi kesaksian *de auditu* menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional. Memang jarang ditemukan

¹³ Asmuni, *Testimonium de auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 195.

putusan yang mengkonstruksi kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti sama sekali tidak ada.¹⁴

Berdasarkan pengakuan tersebut, pada intinya *testimonium de auditu* hanya dapat diterima sebagai alat bukti tidak langsung. Sehingga, dalam hukum acara pidana *testimonium de auditu* dapat diakui dan digunakan sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana seperti diakui *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata yang hanya dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan. oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kapan keterangan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk ataupun persangkaan, karena keberatan yang disangkikan dalam *testimonium de auditu* terletak pada benar atau tidaknya ucapan pihak saksi yang tidak ke pengadilan. Maka inti dari dipakainya keterangan tersebut ialah sejauh mana ucapan saksi yang berikan di pengadilan.¹⁵ Walaupun hanya sebagai alat bukti petunjuk dan persangkaan, suatu alat bukti agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat sebagai alat bukti sah. Maka, saksi dalam memberikan kesaksiannya harus melakukan sumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, agar terjamin kebenaran kesaksiannya dengan fakta peristiwa pidana¹⁶.

Testimonium de auditu sebagai alat bukti petunjuk, bahwa alat bukti tersebut dapat diterima berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung No. 193 PK/Pid.Sus/2010 dan didasarkan dari putusan-putusan Mahkamah Agung

¹⁴Hukum Online, *Arti Testimonium de auditu*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditu-i>, Di akses pada tanggal 19 Februari 2018

¹⁵ Asprianti Wangke, **Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana**, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hlm.149.

¹⁶ Pasal 160 ayat (30) KUHAP, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing - masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

sebelumnya.¹⁷ Perlu diketahui bahwa petunjuk merupakan alat bukti yang keempat dimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mengenai definisi petunjuk itu sendiri merupakan suatu tindakan ataupun peristiwa yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.¹⁸ Biasanya petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, ataupun keterangan terdakwa. Berdasarkan yurisprudensi, eksistensi alat bukti petunjuk sangat penting dan apabila alat bukti ini diabaikan, kemungkinan menyebabkan putusan *judex facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung.¹⁹ Jadi, walaupun pada dasarnya *testimonium de auditu* dikecualikan, tapi setidaknya dapat menjadi alat bukti petunjuk.

Menurut penulis, walaupun *testimonium de auditu* diakui sebagai alat bukti dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang pada intinya memperluas definisi saksi dan keterangan saksi dalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Namun, *testimonium de auditu* tidak dapat disetarakan dengan saksi dan keterangan saksi dalam ketentuan KUHAP karena apabila disetarakan dengan ketentuan KUHAP maka seseorang siapapun bisa saja mengaku sebagai saksi yang tentu saja dapat memberikan keterangan palsu. Keterangan *testimonium de auditu* memang dapat digunakan sebagai alat bukti apabila mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana dan keterangannya diberikan berdasarkan sumpah, alangkah baiknya keterangan saksi hanya digunakan sebagai alat bukti petunjuk jika hal itu memang diperlukan untuk mendukung alat bukti lain.

¹⁷ Asprianti Wangke, *loc.cit*, hlm. 149.

¹⁸ Pasal 188 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Arbyanto Takasihaeng, **Praktik Peradilan Dalam Penerapan Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP**, *Lex Crimen* Vol. II/No. 3/Juli/2013, hlm.129.

Testimonium de auditu sebagai alat bukti yang digolongkan sebagai petunjuk, berarti *testimonium de auditu* kekuatan pembuktiannya sama dengan yang ditentukan dalam Hukum acara pidana yaitu kekuatan pembuktiannya bebas.²⁰ Sebagaimana dengan petunjuk dapat dijadikan alat bukti, maka *testimonium de auditu* harus mempunyai syarat mempunyai relevansi satu sama lain atas peristiwa yang terjadi, peristiwa maupun keadaan perbuatan tersebut haruslah saling besesuaian dengan kejahatan yang terjadi, serta keterangannya harus berdasarkan pengamatan hakim.²¹ Demikian, pembuktian alat bukti tersebut tidak dapat dikesampingkan karena jika terjadi adanya tindak pidana yang diluar kehadiran saksi-saksi maka apabila dikesampingkan dapat merugikan keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnya, *testimonium de auditu* sebagai alat bukti persangkaan. Biasanya alat bukti persangkaan digunakan dalam pembuktian hukum acara perdata. Dalam kamus hukum, persangkaan disebut *vermoedem* yang artinya dugaan (*presumtie*) yaitu berupa kesimpulan yang ditarik oleh Undang-undang atau oleh hakim dari suatu perbuatan yang diketahui terhadap perbuatan yang belum diketahui.²² Dalam menarik suatu kesimpulan dari persangkaan, terdapat dua cara untuk menarik kesimpulan persangkaan tersebut yaitu apabila yang menarik kesimpulan itu hakim, maka itu dinamakan persangkaan hakim (*presumption of fact*). Dan, apabila dalam menarik kesimpulan persangkaan

²⁰Penjelasan Kekuatan Pembuktian Bebas artinya tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan". (Damang Averroes Al-Khawarizmi, **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**, <http://www.negarahukum.com/hukum/813.html>, Diakses pada tanggal 11 Mei 2018.

²¹ Djoko Prakoso, **Alat Bukti Dan Kekuatann Pembuktian Di Dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 96.

²² Sudut Hukum, **Alat Bukti Persangkaan**, <https://www.suduthukum.com/2017/10/alat-bukti-persangkaan.html>, diakses pada tanggal 3 mei 2018.

tersebut adalah Undang-undang maka persangkaan itu dinamakan persangkaan menurut hukum atau Undang-undang (*presumption of law*)²³. Terkait hal tersebut, maka *testimonium de auditu* termasuk sebagai bagian dari alat bukti persangkaan menurut hakim, karena peran hakim bersifat sangat menentukan dalam menelaah kesaksian seorang saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan. Kekuatan alat bukti persangkaan hakim pun pada dasarnya ialah bebas (*vrij bewijskrahct*).²⁴

Dalam persangkaan-persangkaan suatu peristiwa hukum dibuktikan secara tidak langsung, dengan itu pembuktiannya melalui atau dengan perantara alat bukti lainnya terlebih dahulu. Suatu persangkaan cukup dijadikan bukti untuk mengabulkan suatu tuntutan, karena terdapat suatu ketentuan yang melarang untuk memberikan kepercayaan kepada keterangan satu orang saksi yaitu Pasal 1906 KUHPerdara sehingga satu persangkaan saja sudah dapat mengabulkan suatu tuntutan.²⁵ Jadi dapat disimpulkan, persangkaan dapat melengkapi alat bukti lainnya seperti halnya melengkapi saksi tunggal.

Kedudukan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tidak langsung dapat melengkapi maupun menguatkan batas minimum pembuktian dengan tidak menyimpang asas *unus testis nullus testis*. Hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 bahwa “*testimonium de auditu* berguna untuk memperkuat keterangan saksi lainnya”. Hal ini berkaitan dengan alat bukti persangkaan yang sama-sama dapat melengkapi alat bukti lainnya, yaitu saksi yang berdiri sendiri. Menurut penulis, *testimonium de auditu*

²³ Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 46.

²⁴ Asmuni, ***Testimonium de auditu* Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh**, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 197.

²⁵ Subekti, *op.cit*, hlm. 49.

sebagai alat bukti yang digunakan untuk menguatkan saksi yang berdiri sendiri agar tidak menyimpang asas *unus testis nullus testis* tidak terlepas dari *testimonium de auditu* yang diakui secara eksepsional dan dikonstruksikan sebagai persangkaan, sehingga *testimonium de auditu* dapat menguatkan saksi lain dengan memenuhi syarat minimum pembuktian. Maka dapat diketahui, bahwa *testimonium de auditu* dapat sebagai pendukung dalam proses pembuktian di pengadilan.

Jadi, dapatlah diketahui dari uraian diatas. Kedudukan *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan pidana mempunyai peran penting dalam hal pembuktian sebagaimana seperti alat bukti dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dimana kedudukannya tersebut dalam hukum acara pidana dapat digunakan sebagai petunjuk dan persangkaan. Dalam hal ini *testimonium de auditu* dapat sebagai tambahan alat bukti apabila diperlukan dan dapat menguatkan alat bukti lain apabila hal tersebut saling memiliki relevansi, sehingga dapat menambah keyakinan hakim. Serta, apabila terdapat alasan yang menguatkan kebenaran keterangan *testimonium de auditu* maka keterangannya dapat dipertimbangkan. Sehingga, sangatlah tidak mutlak keterangan *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti, dan alangkah baiknya diterima dahulu dengan mempertimbangkan keterangan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta bersifat *erga omnes* yang berlaku bagi siapa saja yang tidak hanya bagi para pihak yang berperkara saja. *Erga omnes* dianggap termasuk fungsi perundang-undangan (*legislative function*), maksudnya hakim dalam menetapkan hukum semata-mata bukan untuk peristiwa konkret saja melainkan juga menetapkan hukum bagi

peristiwa yang mendarang.²⁶ Secara historis dan filosofis Undang-undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi hanya diperkenankan sebagai *negative legislator* yaitu membatalkan norma dan membiarkan norma tetap diberlakukan oleh lembaga legislatif. Pada prinsipnya, Mahkamah konstitusi memang hanya boleh menguji Undang-undang yang bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak boleh mengatur atau memberlakukan norma yang merupakan ranah legislatif yang kewenangannya dimiliki oleh DPR dan pemerintah sebagai *positive legislator*.

Berdasarkan ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

1. Putusan Mahkamah konstitusi mengenai pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung;
2. Jika diperlukan perubahan terhadap Undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mencegah terjadinya kekosongan hukum. Jika DPR atau Presiden tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi berarti secara tidak langsung putusan itu menjadi sumber hukum dan bersifat *erga omnes*.²⁷

Menurut penulis, secara normatif walaupun Mahkamah Konstitusi bukan termasuk *positive legislator* dan hanya *negative legislator*. Namun, apabila DPR atau Pemerintah tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau tidak

²⁶ Steven Suprantio, *op.cit*, hlm. 41.

²⁷ Steven Suprantio, *ibid*, hlm. 46.

melaksanakan kewenangannya yang telah ditentukan dalam pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka secara langsung Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sumber hukum. Jadi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VII/2010 telah menjadi sumber hukum yang bersifat *erga omnes* karena DPR ataupun Pemerintah tidak melakukan kewenangannya yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Serta, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VII/2010 telah dimuat dalam Berita Negara. Sehingga penyidik, Jaksa, Mahkamah Agung, dan Peradilan dibawahnya wajib mengetahui dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010.

C. Dasar alasan permohonan kasasi terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014 terkait alasan permohonannya yang menganggap *judex facti* salah dalam mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu*.

Dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014 mengenai kasus tindak pidana pencabulan, dimana adanya putusan ini karena diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi No. 636/Pid/2013/PT.Sby. Pengajuan permohonan kasasi tersebut dilakukan karena terdapat beberapa alasan-alasan permohonan kasasi terkait *testimonium de auditu* yang telah diuraikan diatas. Dalam alasan-alasan permohonan kasasi tersebut yang menjadi dasar pengajuan kasasi ini yaitu terkait putusan hakim Pengadilan Tinggi No. 636/Pid/2013/PT.Sby yang mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, pemohon menganggap putusan *judex*

facti keliru karena menurut pemohon dianggap telah menyimpang ketentuan Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014 hakim Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan menguatkan putusan No. 636/Pid/2013/PT.Sby.

Berkaitan dengan *testimonium de auditu*, Mahkamah Konstitusi menciptakan norma baru dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang No. 8 Tahun 1981 terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui keberadaan *testimonium de auditu* dengan memperluas definisi saksi keterangan saksi yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, lihat, dan alami sendiri”. Dimana putusan ini telah bersifat *final* dan *binding*.²⁸ Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menjadi sumber hukum acara pidana dalam menangani perkara yang berkaitan dengan *testimonium de auditu*. Putusan Mahkamah Konstitusi berupa putusan bersifat *negative* yaitu meniadakan Undang-undang dan putusan bersifat *positive* yaitu menciptakan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur. Putusan bersifat *negative* saat Undang-undang menyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan, Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *positive* saat Mahkamah Konstitusi memberikan putusan diluar wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, seperti dengan adanya

²⁸Penjelasan “*Final* maksudnya putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh lagi. Sedangkan, *Binding* merupakan sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat” (Steven Supranto, **Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “*Testimonium de auditu*” Dalam Peradilan Pidana**, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 – 52, hlm. 46).

*ultra petita*²⁹ yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.³⁰ Setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan tidak hanya berdampak bagi pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga kepada warga negara, karena dalam hal menguji suatu Undang-undang maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*.³¹ Serta, putusannya berlaku bagi semua perkara yang sama, seperti halnya perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2014.

Berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini terkait dasar alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa. Penulis akan menganalisa terlebih dahulu uraian alasan-alasan permohonan kasasi dalam putusan No. 737 K/Pid/2014 yang mengenai alasan permohonan kasasi pertama yang terkait *judex facti* mempertimbangkan saksi Moh. Fadurrahman, saksi Fadillah, maupun saksi sutami yang merupakan saksi *testimonium de auditu* yang diajukan oleh husnul hotimah selaku pelapor. Bahwa berdasarkan alasan pemohon keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai saksi,³² sehingga tidak cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Menurut penulis, Pembuktian kesalahan terdakwa sangat memegang peranan penting, karena jika teknik pembuktian tidak dilaksanakan dengan baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum, maupun hakim. Maka terdakwa bisa saja akan bebas dari hukuman.

²⁹Penjelasan “*Ultra petita* merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat amar putusan melebihi yang dimohonkan oleh pemohon atau dengan kata lain *positive legislator*” (Aninditya Eka Bintari, **Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara**, Pandecta, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013, hlm. 90)

³⁰Aninditya Eka Bintari, **Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara**, Pandecta, Volume 8. Nomor 1. Januari 2013, hlm. 90

³¹Penjelasan “Putusan bersifat *erga omnes* berarti putusan yang mempunyai kekuatan mengikat yang berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa” (Steven Suprantio, **Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “*Testimonium de auditu*” Dalam Peradilan Pidana**, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 – 52, hlm. 40)

³² Pasal 185 ayat 5 KUHAP yang menyatakan “Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.”

Suatu keterangan saksi termasuk alat bukti yang sah yang bersifat bebas, tidak menentukan, dan tidak sempurna. Hal tersebut tidaklah mengikat hakim, Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian, kesempurnaan, dan keberadaanya dari keterangan saksi. Namun, tergantung pada keyakinan dan penilaian hakim untuk menilai sempurna atau hakim mempunyai kewajiban untuk menerima ataupun tidak, sehingga hakim juga dapat menyingkirkan keberadaan keterangan saksi.³³ Subekti menyatakan, *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang diperoleh dari orang lain tentang suatu tindak pidana tidak ada harganya sama sekali. Namun, menurutnya hakim tidak serta merta menolak dan tidak dilarang untuk memeriksanya dalam sidang di pengadilan dan membenarkan secara eksepsional menerima keterangan *testimonium de auditu* dengan syarat tertentu.³⁴ Terdapat kewajiban hukum kepada hakim untuk mendengar keterangan saksi dimuka persidangan, dengan tidak mempermasalahkan bahwa saksi tersebut menguntungkan maupun meringankan yang mana diminta oleh terdakwa, penasehat hukum, atau penuntut umum untuk dihadirkan di persidangan.³⁵

Testimonium de auditu sebagai alat bukti tergantung pada tujuan mengajukannya, hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif yang memberikan kebebasan kepada hakim terkait keyakinannya, meskipun terdapat alat bukti lain dan mempunyai relevansi dengan *testimonium de auditu*, maka *testimonium de auditu* dapat digunakan

³³ Putra Akbar Saleh, **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan**, *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm. 88.

³⁴ Subekti, *op.cit*, hlm. 45.

³⁵ Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, menyatakan “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”.

sebagai menambah keyakinan hakim dan keterangan *testimonium de auditu* dapat diabaikan apabila tidak sejalan dengan peristiwa pidana.³⁶

Jika kita perhatikan uraian alasan permohonan kasasi dalam perkara Putusan No. 737 K/Pid/2014, saksi Moh. Fadurrahman, saksi Fadillah, maupun saksi sutami yang merupakan saksi bersifat *testimonium de auditu* diperoleh dari cerita korban. Perlu diketahui terlebih dahulu terkait saksi yang bersifat *testimonium de auditu* yaitu kesaksian di sidang pengadilan yang diperoleh secara tidak langsung dengan mendengar dari pernyataan orang lain ataupun dari korban sendiri, sehingga kesaksian tersebut tidak diperoleh berdasarkan apa yang ia dengar, ia lihat, dan alami sendiri.³⁷ Hal ini sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 Hakim Konstitusi menyatakan bahwa arti penting saksi dan keterangan saksi bukan terletak apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan peristiwa pidana. Maka, perlu diketahui saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti karena mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana yang keterangannya diperoleh dengan mendengar cerita dari saksi korban secara langsung. Sehingga, keterangan tersebut tentu dapat mempunyai keterangan yang benar-benarnya dengan fakta-fakta peristiwa pidana, seperti yang saksi korban ceritakan kepadanya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hakim memang dilarang menggunakan keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti karena diperoleh dari hanya mendengar saja suatu peristiwa dari orang lain. Larangan hal ini baik dan bahkan sudah semestinya, namun harus diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang

³⁶ Eddy O.S Hiariej, *op.cit.* hlm. 60.

³⁷ Munir Fuady, *loc.cit.* hlm 132.

menjelaskan telah mendengar terjadinya suatu kejadian orang lain, kesaksian seperti ini tidak harus dikesampingkan begitu saja. Karena dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.³⁸

Jadi, pertimbangan *judex facti* yang menurut alasan permohonan kasasi menyimpang ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP dengan mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu*, menurut penulis hal ini tidaklah menyimpang ketentuan tersebut karena suatu keterangan *testimonium de auditu* yang mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana serta dapat memperkuat keyakinan hakim maka dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas definisi saksi dan keterangan saksi pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP dan mengakui keberadaan *testimonium de auditu*, sehingga dapat digunakan alat bukti sah.

Mengenai hal pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana di Indonesia lebih mengacu pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wetelijk bewijstheorie*) dan teori pembuktian ini menganut asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif ini, mempunyai maksud sebagai berikut:

³⁸ Asprianti Wangke, **Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana**, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hlm. 151.

1. Untuk menentukan seseorang bersalah, diperlukan suatu minimum alat bukti yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang;
2. Walaupun bukti melebihi minimum pembuktian, tetapi hakim tidak memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.³⁹

Maka, dalam menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana diperlukan minimal dua alat bukti yang sah dan dilengkapi dengan keyakinan hakim yang menyatakan seseorang telah benar melakukan tindak pidana. Oleh karena sistem pembuktian pidana menganut asas *unus testis nullus testis*, dimana dalam membuktikan peristiwa pidana harus terdapat minimal dua saksi.

Pada hakikatnya asas *unus testis nullus testis* dalam pembuktian perkara pidana memang harus diterapkan. Namun, apabila terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang hanya terdapat pengakuan dari saksi korban saja. Asas *unus testis nullus testis* perlu dilengkapi dengan keberadaan *testimonium de auditu* untuk menambah keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Sehingga dari uraian diatas, perlu diketahui bahwa ketentuan pasal 185 ayat (3) KUHAP yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 185 (2) KUHAP⁴⁰ tidak berlaku apabila tidak disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP tersebut, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya prinsip *unus testis nullus testis* dalam pembuktian perkara pidana tidaklah bersifat mutlak.

Keberadaan *testimonium de auditu* mempunyai keterkaitan dengan asas *unus testis nullus testis*, dimana keterkaitan tersebut bahwa *testimonium de auditu*

³⁹ Subekti, *Op.cit*, hlm. 7.

⁴⁰ Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

dapat melengkapi maupun menguatkan saksi tunggal sehingga dapat memenuhi minimum alat bukti hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983.⁴¹ Suatu keterangan saksi tunggal dapat digunakan sebagai alat bukti sah apabila memiliki relevansi dengan alat bukti lain, sehingga dapat membenarkan suatu fakta peristiwa pidana.⁴² Bila dikaitkan dengan perkara pencabulan dimana tidak diketahui semua orang yang hanya terdapat satu saksi saja yaitu saksi pelapor atau korban saja, maka peranan *testimonium de auditu* yang mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana tersebut sangat membantu dan menguatkan ataupun melengkapi alat bukti lain dalam proses pembuktian di persidangan terutama menyangkut perkara yang minim alat bukti.

Terkait alasan pemohon yang menganggap keterangan husnul hotimah yang berdasarkan alasan pemohon kasasi berdiri sendiri dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut penulis, putusan *judex facti* yang mempertimbangkan keterangan husnul hotimah atau saksi korban yakni saksi yang berdiri sendiri tidaklah menyimpang ketentuan asas *unus testis nullus testis*. Perlu diketahui, hakim berhak mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi mengenai tindak pidana agar mendapatkan suatu kebenaran, dalam hal ini yang utama adalah keterangan dari korban. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 160 ayat (1) huruf b bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Serta, karena tidak setiap kejadian dapat disaksikan oleh banyaknya seorang saksi, demikian keterangan saksi yang berdiri sendiri

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983, yang intinya menjelaskan “Bahwa *testimonium de auditu* dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi lainnya”.

⁴² Pasal 185 ayat (4) mengatakan bahwa “keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

dapat menjadi alat bukti yang sah jika terdapat alat bukti lain yang menguatkan serta memiliki relevansi sehingga dapat membenarkan suatu fakta peristiwa pidana.⁴³ Dalam hal ini alat bukti yang dapat menguatkan yaitu alat bukti keterangan *testimonium de auditu* yang mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana yang mana diperoleh dari cerita korban.

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara harus berdasarkan peristiwa konkret yang benar-benar terjadi. Hakim harus menentukan dan mengkonstatir peristiwa mana yang sungguh-sungguh telah terjadi, hal ini berarti sekaligus juga menentukan kebenaran peristiwa yang terjadi. Hakim tidak boleh menetapkan peristiwa sebagai dasar putusan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu, kecuali peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak perlu dibuktikan dipersidangan yang antara yaitu peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui atau tidak mungkin diketahui (dalam hal *verstek* atau pengakuan); hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya; pengetahuan tentang pengalaman.⁴⁴

Dalam memutus perkara tentu saja hakim harus merujuk pada Undang-undang yang berlaku. Namun, dalam konteks hukum di Indonesia, hakim bukanlah corong Undang-undang. Hakim merupakan corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48 tahun 2009 Kekuasaan

⁴³ Martiman Prodjohamidjojo, **Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.22.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, **Bunga Rampai Ilmu Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 108-109.

Kehakiman⁴⁵. Perlu di ingat bahwa Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. kebiasaan dalam masyarakat, traktat atau perjanjian, yurisprudensi, serta doktrin juga merupakan sumber hukum yang dapat digunakan hakim sebagai rujukan.

Terkait hakim yang harus terikat pada Undang-undang, terdapat pendapat yang menyatakan hakim tetap terikat pada Undang-undang (formalitas) dan terdapat pendapat lain yang menitikberatkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga hakim tidak harus terikat pada Undang-undang dengan memberikan kebebasan pada hakim.⁴⁶ Hukum pembuktian dalam praktek peradilan Indonesia adalah formalistis bahwa alat-alat bukti terbatas dan dapat atau tidaknya diajukan serta penilaiannya terikat pada berbagai ketentuan.⁴⁷

Mengingat bahwa hakim merupakan pembentuk hukum juga lembaga pembentuk Undang-undang, perlu diingat juga kebebasan hakim. Maka, selama pembentuk Undang-undang yaitu lembaga legislatif yang mustahil untuk dapat memperhitungkan, memperhatikan dan menuangkan segala peraturan hukum yang tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam Undang-undang yang dikarenakan pembentuk Undang-undang hanya dapat memberi ketentuan yang bersifat umum. Oleh karena itu, pentingnya peran hakim dengan memberikan kebebasan kepada hakim untuk membentuk atau menciptakan hukum sesuai keadaan masyarakat.⁴⁸

⁴⁵Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 45.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *ibid*, hlm. 125.

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 179.

Menurut penulis, perbuatan terdakwa H. Imam dalam melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban husnul hotimah telah memenuhi pasal 289 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan putusan sebelumnya. Serta, hakim *judex facti* tidak salah menerapkan maupun mempertimbangkan keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti karena keterangan tersebut dapat melengkapi atau mendukung alat bukti lain serta dapat menambahkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban.

Menurut penulis, pentingnya keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti di persidangan dalam kasus tindak pidana pencabulan yang mana perbuatan tersebut sangat sulit pembuktiannya karena perkara seperti ini tidak mungkin dilakukan didepan publik sehingga tidak ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa dalam perkara tersebut terdapat 4 alat bukti petunjuk dan adanya barang bukti yang dapat menambah keyakinan hakim yang telah memutus perkara ini.

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh saksi korban yaitu husnul hotimah yang terdiri dari saksi Moh. Fadurrahman, saksi fadilah, dan saksi satumi yang merupakan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* yang mana keterangannya tersebut diperoleh dari cerita korban menurut penulis tidaklah menyimpang ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP karena keterangan dari saksi-saksi mempunyai relevansi dengan peristiwa pidana maka dapat digunakan sebagai alat bukti sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 dan definisi dalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP juga telah diperluas.

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon atau terdakwa menjadi hal pokok dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh hakim Mahkamah Agung. Dalam pasal 253 ayat (1) huruf a, b, dan c KUHAP mengatur mengenai alasan kasasi yang menyatakan:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Suatu permohonan kasasi akan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung, apabila menurut pendapat hakim Mahkamah Agung bahwa alasan dan keberatan-keberatan permohonan kasasi ternyata tidak dapat dibenarkan, *judex facti* ternyata tidak salah dalam penerapan hukum, tidak terdapat kelalaian dalam acara, ataupun ternyata *judex facti* tidak melampaui wewenangnya. Sehingga dengan demikian, Mahkamah Agung dapat menolak permohonan kasasi.

Alasan permohonan kasasi yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka dapat dibenarkan menurut Undang-undang. jika dasar alasan permohonan kasasi tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang telah diatur maka alasan permohonan kasasi tidak dibenarkan menurut Undang-undang, alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang adalah:⁴⁹

- 1) Keberatan kasasi putusan Pengadilan Tinggi Menguatkan putusan Pengadilan Negeri;

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 567.

- 2) Keberatan atas penilaian pembuktian;
- 3) Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta;
- 4) Alasan yang tidak menangkut persoalan perkara;
- 5) Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda;
- 6) Keberatan kasasi pengembalian barang bukti;
- 7) Keberatan kasasi mengenai vonum.

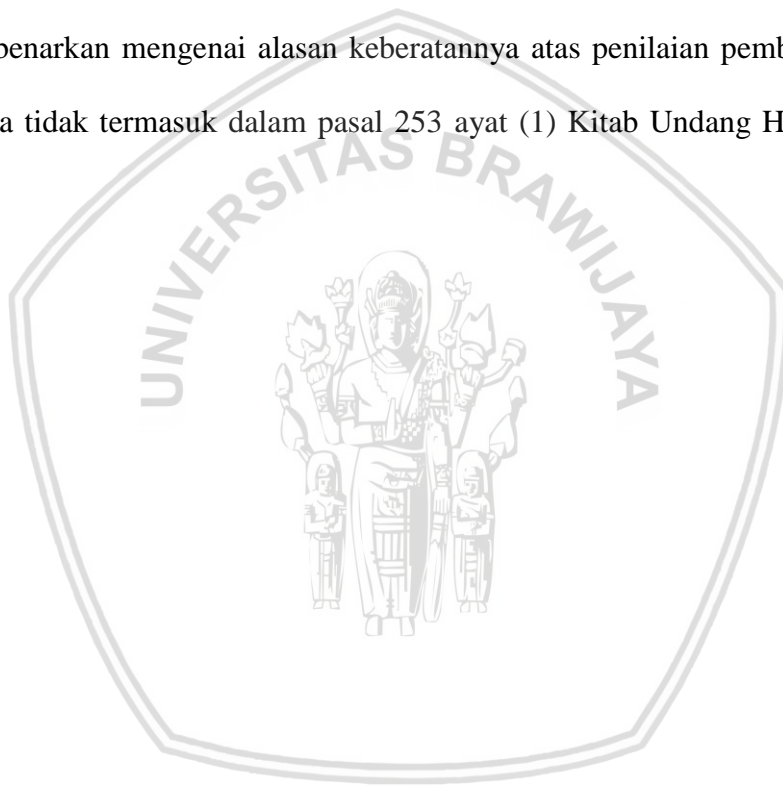
Menurut penulis, alasan permohonan kasasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014 termasuk alasan kasasi yang tidak dibenarkan menurut Undang-undang. Seperti yang telah disebutkan diatas terkait alasan kasasi yang tidak dibenarkan menurut Undang-undang, alasan kasasi tersebut termasuk dalam alasan kasasi yang keberatan atas penilaian pembuktian karena alasan keberatan ini tidak termasuk alasan kasasi dalam ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP.⁵⁰ Penilaian pembuktian merupakan kewenangan hakim, jadi digunakan alat bukti sebagai pembuktian tergantung pada keyakinan hakim. Hal ini sebagaimana sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijstheorie*).

Mengacu pada putusan *judex facti*, bahwa alasan-alasan yang memberatkan lebih banyak daripada alasan-alasan yang meringankan sehingga menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencabulan terhadap korban Husnul Hotimah sebanyak tiga kali yang dilakukan dengan kekerasan ataupun paksaan, dengan memeluk, mencium bibir dan memegang payudara korban dalam waktu yang berbeda, Sehingga, alasan-alasan

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 568.

memberatkan dan terbuktinya perbuatan terdakwa juga membuat hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014 menurut penulis hakim telah tepat menolak kasasi terdakwa karena alat bukti yang memberatkan terdakwa lebih banyak sehingga terbukti secara benar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan serta terdapat alasan-alasan keberatan permohonan kasasi yang tidak dapat dibenarkan mengenai alasan keberatannya atas penilaian pembuktian yang alasannya tidak termasuk dalam pasal 253 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana.



BAB V

PENUTUP

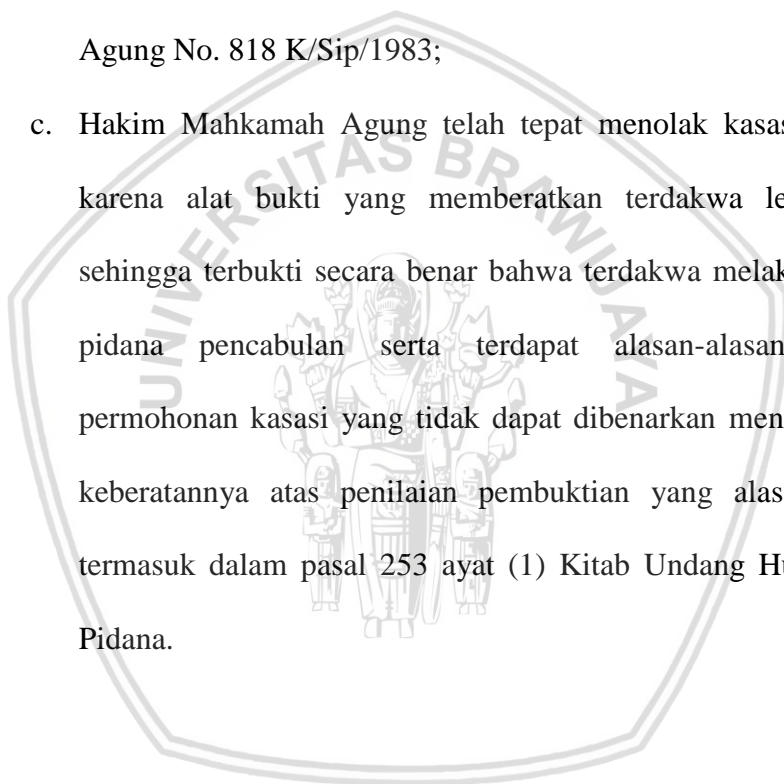
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Kedudukan *Testimonium de auditu* yaitu sebagai berikut:
 - a. Kedudukan Keterangan *testimonium de auditu* dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana tidak mengakui keterangan tersebut karena keterangan yang diperoleh dari mendengar dari orang lain saja yang tidak berdasarkan apa yang ia lihat sendiri, tidak ia dengar sendiri, tidak ia alami sendiri suatu peristiwa pidana tidak menjamin kebenarannya.
 - b. Dalam praktek peradilan, Keberadaan *testimonium de auditu* tidak sepenuhnya diakui sebagai alat bukti langsung, keterangan *testimonium de auditu* hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dalam Hukum Acara Pidana dan sebagai alat bukti persangkaan dalam Hukum Acara Perdata.
2. Terkait dasar alasan pemohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 737 K/Pid/2014 tidak dapat dibenarkan karena:
 - a. Keterangan *testimonium de auditu* menguatkan keterangan saksi korban yang berdiri sendiri serta dapat membantu menambah

keyakinan hakim bahwa benar terjadi suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dimana keterangan tersebut diperoleh langsung dari cerita korban.

- b. Keberadaan *testimonium de auditu* mempunyai keterkaitan dengan asas *unus testis nullus testis*, dimana keterkaitan tersebut bahwa *testimonium de auditu* dapat melengkapi maupun menguatkan saksi tunggal hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983;
- c. Hakim Mahkamah Agung telah tepat menolak kasasi pemohon, karena alat bukti yang memberatkan terdakwa lebih banyak sehingga terbukti secara benar bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan serta terdapat alasan-alasan keberatan permohonan kasasi yang tidak dapat dibenarkan mengenai alasan keberatannya atas penilaian pembuktian yang alasannya tidak termasuk dalam pasal 253 ayat (1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana.



B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, maka saksi dan keterangan saksi diharapkan dalam R-KUHAP haruslah diperjelas dengan tidak ada pembatasan terkait alat bukti tersebut agar dapat menciptakan kepastian hukum.
2. Pentingnya *testimonium de auditu* dalam pembuktian, maka diharapkan hakim-hakim lainnya tidak mengabaikan keterangan *testimonium de auditu* dengan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Hal ini untuk membantu mengungkap benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana seperti terjadinya tindak pidana pencabulan yang mana pembuktiannya sangatlah tidak mudah.
3. Diharapkan pemerintah terutama lembaga legislatif dan para penegak hukum lebih jeli lagi melihat kebutuhan hukum guna menunjang proses beracara di persidangan, dengan digunakannya keterangan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rahmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Adami Chazawi, **Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana (Edisi Revisi)**, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- _____, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Kencana, Jakarta, 2014.
- Darwin Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Djoko Prakoso, **Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Eddy O.S Hiariej, **Teori & Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Johny Ibrahim, **Teori Metode & Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, 2005.
- Martiman Proodjohamidjojo, **Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Maruarar Siahaan, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 (cetakan ke-13).

Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, **Bunga Rampai Ilmu Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011.

Termorshuizen, Marjanne, **Kamus Hukum Belanda-Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 2002.

Tolib Effendi, **Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia**, Setara Press, Malang, 2014.

Zulkarnain, **Praktik Peradilan Pidana**, Setara Press, Malang, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2010

JURNAL

Aninditya Eka Bintari, **Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara**, *Pendecta Research Law Journal*, Volume 8 No. 1 Januari 2013.

Asprianti Wangke, **Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana**, *Lex Crimen*.Vol. VI/No. 6/Ags/2017.

Putra Akbar Saleh, **Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan**, *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Prisco Jeheskiel Umboh, **Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana**, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.

Steven Suprantio, **Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “*Testimonium de auditu*” Dalam Peradilan Pidana**, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 – 52.

Widhi Jatmiko, dkk. **Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak**, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, I (1): 1-11.

INTERNET

Damang Averroes Al-Khawarizmi, **Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**,
<http://www.negarahukum.com/hukum/813.html>.

Hukum Online, **Arti Alat Bukti Tidak Langsung**,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a824ec03c369/arti-alat-bukti-tidak-langsung>

Hukum Online, **Arti Testimonium de auditu**,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58dcb3732cca3/arti-itestimonium-de-auditu-i>.

Hukum Online, **Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana>, Diakses pada tanggal 13 Februari 2018.

Hukum Online, **Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi**,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota-dan-alibi>.

Hukum Online, **Arti Res Judicata Pro Veritate Habetur**,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5301326f2ef06/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur>.

Hukum Online, **Yusril Ihza Mahendra Minta MK Tafsirkan Definisi ‘Saksi’ dalam KUHAP**,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cceada4af703/Yusril_Ihza_Mahendra-minta-mk-tafsirkan-definisi-saksi-dalam-kuhap.